



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025

RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**



bpkad.kabbogor

Visit our website
<https://bpkad.bogorkab.go.id>





BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

10. Desa ...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
25. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29. Kegiatan ...

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
30. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang urusan/unsur, tanggung jawab dan fungsi.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- (5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dalam SIPD.
- (6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
- (7) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. pendanaan dan sumber pendanaan; dan
- d. dukungan terhadap prioritas nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2026

Pasal 5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 memedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. terjadi ...

- c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja; dan
 - d. terjadi perubahan Renstra PD;
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2026;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026; dan
- c. penetapan perubahan Renja PD Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

AJAT ROCHMAT JARNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 24



KATA PENGANTAR

Dengan Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2026 tepat waktu.

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini merupakan dokumen rencana kerja yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan. Dokumen ini sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen BPKAD Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan BPKAD yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilingkup BPKAD Kabupaten Bogor.

Demikian, akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Cibinong, Agustus 2025
Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor,



ACHMAD WILDAN, S.E., M.M.

Pembina
NIP. 197608262002121005



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-23
1.3 Maksud dan Tujuan	I-29
1.4 Sistematika Penulisan	I-30
BAB II HASIL EVALUASI BPKAD TAHUN 2024	II-1
2.1 Capaian Kinerja BPKAD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD	II-48
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	II-55
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	II-63
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat	II-86
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	III-20
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III-29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	IV-1
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026 BPKAD	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1





DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Keterkaitan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dengan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor	I-19
Tabel 1.2	Keterkaitan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD dengan Visi Kementerian Dalam Negeri	I-20
Tabel 1.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat dengan Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Bogor	I-21
Tabel 2.1	Rentang Capaian Indikator Kinerja Positif	II-1
Tabel 2.2	Rentang Capaian Indikator Kinerja Negatif	II-1
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD pada Tahun 2020	II-3
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD pada Tahun 2021-2023	II-4
Tabel 2.5	Realisasi IKU BPKAD pada Tahun 2024	II-5
Tabel 2.6	Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2021 s.d 2023	II-33
Tabel 2.7	Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2024	II-34
Tabel 2.8	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	II-38
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD Tahun 2020 s.d Tahun 2024	II-39
Tabel 2.11	Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.12	Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.13	Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2023	II-45
Tabel 2.14	Pencapaian realisasi bantuan keuangan Tahun 2024	II-47
Tabel 2.15	Pengukuran Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2024	II-49
Tabel 2.16	Pengukuran Indikator Kinerja Penunjang BPKAD Tahun 2024	II-49
Tabel 2.17	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	II-50
Tabel 2.18	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	II-51
Tabel 2.19	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	II-53
Tabel 2.20	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	II-54
Tabel 2.21	Pemetaan Analisa SWOT BPKAD	II-57
Tabel 2.22	Isu Strategis BPKAD Tahun 2026	II-61
Tabel 2.23	Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026	II-63
Tabel 2.24	Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-73





Tabel 3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-4
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.3	Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat	III-7
Tabel 3.4	Sanding Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	III-10
Tabel 3.5	anding Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	III-11
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	III-13
Tabel 3.7	Keterkaitan Program Tahun 2026 BPKAD terhadap RPJMD Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 3.8	Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional	III-20
Tabel 3.9	Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029 BPKAD	III-24
Tabel 3.10	Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029 BPKAD	III-26
Tabel 3.11	Sasaran dan Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029 BPKAD	III-27
Tabel 3.12	Indikator Program BPKAD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029 BPKAD	III-28
Tabel 3.13	Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Tahun 2026	III-28
Tabel 3.14	Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Tahun 2026	III-29
Tabel 3.15	Indikator Kegiatan pada Program Penunjang BPKAD Tahun 2026	III-29
Tabel 3.16	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026	III-30
Tabel 3.17	Program, Kegiatan dan Subkegiatan BPKAD Tahun 2026	III-31
Tabel 4.1	Indikator Program BPKAD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Tahun 2026	IV-3
Tabel 4.3	Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Tahun 2026	IV-4
Tabel 4.4	Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Tahun 2026	IV-4
Tabel 4.5	Indikator Program Penunjang BPKAD Tahun 2026	IV-5
Tabel 4.6	Indikator Kegiatan pada Program Penunjang BPKAD Tahun 2026	IV-5
Tabel 4.7	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026	IV-6
Tabel 4.8	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026	IV-7



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor	I-11
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	I-16
Gambar 1.3	8 Misi Asta Cita	I-17
Gambar 2.1	Capaian Sasaran Strategis 1	II-6
Gambar 2.2	Ketepatan Penetapan APBD	II-6
Gambar 2.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	II-8
Gambar 2.4	Perkembangan Ketepatan Penetapan APBD Tahun 2019-2024	II-8
Gambar 2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	II-9
Gambar 2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi	II-10
Gambar 2.7	Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD	II-11
Gambar 2.8	Faktor Lainnya Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD	II-12
Gambar 2.9	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-13
Gambar 2.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	II-15
Gambar 2.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	II-17
Gambar 2.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	II-18
Gambar 2.13	Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-19
Gambar 2.14	Faktor Lain yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-21
Gambar 2.15	Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	II-22
Gambar 2.16	Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	II-23
Gambar 2.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	II-25
Gambar 2.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	II-26
Gambar 2.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	II-27
Gambar 2.20	Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	II-28





Gambar 2.21	Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	II-29
Gambar 2.22	Rekomendasi Penyesuaian Target IKU	II-31
Gambar 2.23	Pertumbuhan Anggaran Belanja BPKAD 2020-2024	II-39
Gambar 2.24	Diagram Capaian Kinerja Sasaran 1	II-52
Gambar 2.25	Grafik Terwujudnya Pengelolaan BMD yang Tertib	II-54
Gambar 3.1	Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025-2029	III-14
Gambar 3.2	Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD	III-25



LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor disusun secara simultan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Di samping itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan “fondasi” periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, yang telah dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2026 telah memedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta tujuan dan sasaran daerah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keuangan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan
6. Penetapan Renja.

Khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disinkronisasikan dengan substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, dengan mengusung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”. Dengan demikian, penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2026 telah menjadi bagian penting dalam substansi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, meskipun pada saat penyusunan Renja PD tahun 2026, dokumen RPJMD masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Renja PD secara substansi telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan sebagaimana RPJMD Tahun 2025-2029.

Proses sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, tidak hanya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan keuangan di Kabupaten Bogor, tapi juga bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rumusan arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja serta sumber pendanaan yang tertuang dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor ini, diharapkan telah bersinergi dengan dokumen

perencanaan, baik ditingkat Kabupaten Bogor, maupun antar tingkat pemerintahan.

Kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik akan mampu mengimplementasikan tiga prinsip utama pengelolaan keuangan publik yaitu :

- 1) Disiplin Fiskal (aggregate fiscal discipline), yaitu prinsip untuk mengontrol kebijakan fiskal secara konsisten;
- 2) Efisiensi Alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien guna mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas, dan
- 3) Efisiensi teknis dan operasional (technical and operational efficiency), yaitu memastikan pelaksanaan anggaran, dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Secara historical, reformasi manajemen keuangan pemerintah telah berjalan kurang lebih 21 Tahun yang dalam prosesnya dilaksanakan dengan pendekatan penganggaran yaitu, anggaran terpadu (Unified Budgeting), anggaran berbasis kinerja (Performance Base Budgeting), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Ketiga pendekatan penganggaran tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan public yang baik, efektif dan efisien sebagai prasyarat terciptanya good governance and clean government di Indonesia.

Dalam tataran pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menerbitkan begitu banyak pedoman dan begitu banyak bongkar pasang aturan yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Terkini pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu mandatory dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tertera dalam Undang-undang Nomor Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Teknis Perencanaan dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD adalah disusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah tidak lain merupakan salah satu bentuk upaya transformasi manajerial dalam proses perencanaan dan penganggaran yang jika dirujuk pada konsep New Public Management yang secara konseptual masuk pada prinsip reinventing government yang digagas oleh Osbourne dan Gaebler. Terdapat 3 dari 10 prinsip reinventing government yang berkaitan dengan penyusunan renstra diantaranya :

- a. Competitive government: Injecting competition into service delivery. Pemerintah perlu memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.
- b. Mission-driven government: Transforming rule-driven organizations. Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. dan
- c. Results-oriented government: Funding outcomes, not inputs. Pemerintah berorientasi hasil mampu membiayai hasil bukan masukan.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memiliki keharusan untuk menyusun rencana kerja. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan yang diampu oleh BPKAD Kabupaten Bogor.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun secara rutin oleh perangkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewenangan konkuren perangkat daerah berdasarkan bidang urusan/unsur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal penyusunan Renja Perangkat daerah Tahun 2026, dokumen ini disusun secara simultan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 dilakukan secara simultan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2026, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta tercantum dalam SIPD-RI. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Untuk itu, dalam proses penyusunan Renja perangkat daerah, seluruh perangkat daerah berkoordinasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan Badan Perencana Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perangkat Daerah menyusun Renja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 yang memuat program/kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 14 siklus (Siklus Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Siklus Pengadaan, Siklus Penggunaan, Siklus Pemanfaatan, Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan, Siklus Penilaian, Siklus Pemindahtanganan, Siklus Pemusnahan, Siklus Penghapusan, Siklus Penatausahaan, Siklus Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Siklus Pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, Siklus BMD berupa Rumah Negara serta Siklus Ganti Rugi dan Sanksi) dengan meletakkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sebagai acuan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan, akuntabel dan profesional.

a. Definisi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137) serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPKAD Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24).

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Ini disebabkan adanya perubahan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2).

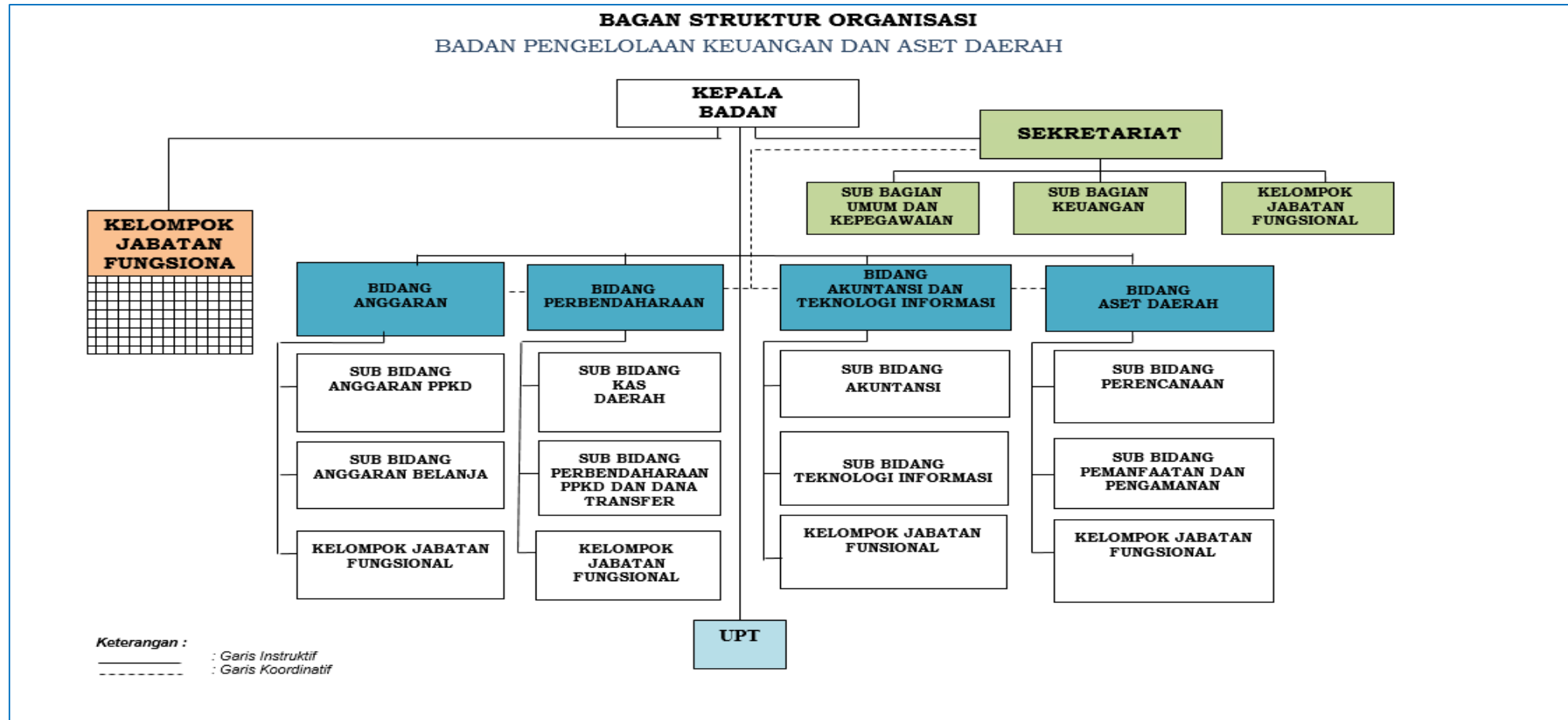
Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022

Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor *mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.*

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berikut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) sebagai berikut:



Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

b. Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor

1. Mengakomodir program, kegiatan, subkegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025-2029 untuk Tahun 2026;
2. Mengoptimalkan dan menyusun peningkatan prioritas kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dengan hasil usulan dalam Forum Perangkat Daerah (Rancangan Awal);
3. Mengompilasi dan menyusun pemeringkatan prioritas kegiatan dan subkegiatan berdasarkan hasil musrenbang RKPD di Kabupaten dengan hasil Forum Perangkat Daerah (Rancangan Renja);
4. Memedomani Final RKPD (Rancangan Akhir Renja).

c. Keterkaitan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dengan Dokumen RKPD

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPAKD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu rancangan awal RKPD.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Di sisi lain, dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dokumen RKPD harus sesuai dan konsisten dengan upaya pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Kabupaten Bogor tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dengan penekanan pada pencapaian tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kemungkinan beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2026 di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Bogor tahun 2026 dirancang untuk dapat mengadopsi perubahan-perubahan tersebut. Dengan kata lain, dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD Tahun 2026 dalam proses penyusunannya maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2026 terlebih dahulu. Berkaitan dengan penganggaran daerah, maka dokumen RKPD tahun 2026 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bogor tahun 2026.

d. **Keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dengan Renstra BPKAD 2025-2029**

Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan dokumen Renstra 2025-2029 baik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan** Pemerintah Daerah sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah ***Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.*** Dengan Indikator Tujuan *Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).*

Adapun **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 adalah ***Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*** Dengan **Indikator Tujuan** yaitu :

- *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

2. **Sasaran** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi”.***

Dengan **Indikator Sasaran** yaitu :

- *Nilai SAKIP*

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**
2. **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.**

Pencapaian sasaran pertama yaitu ***Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas*** diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

- *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi*

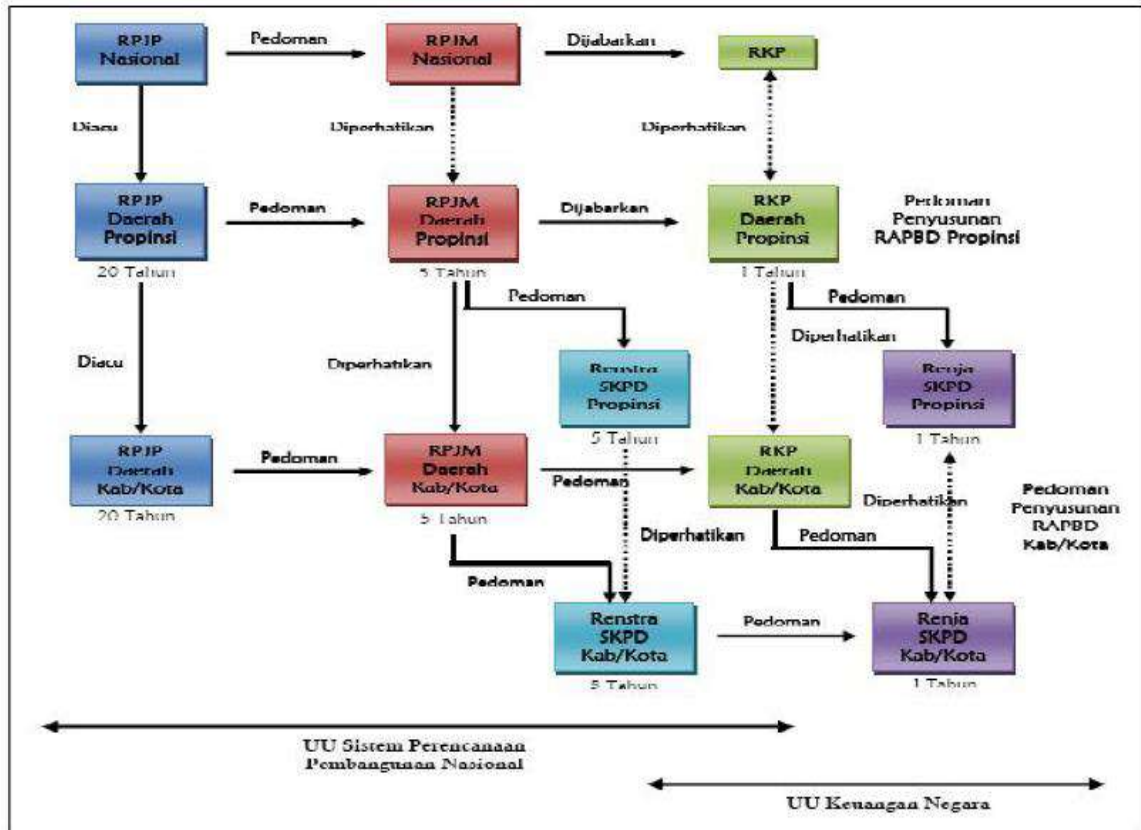
Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu ***Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib***, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi.*

Pada pencapaian sasaran yang kedua tidak mengalami perubahan pada indikatornya.

e. Keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan Renja Kementerian/Lembaga, dan Renja Provinsi Jabar

Keterkaitan antara berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Terdapat sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu pada **Sasaran Strategis 5**:

Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal; TIK yang andal dan berkualitas; Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif; dan Pencapaian tugas khusus yang efektif.

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat dalam sinkronisasi kebijakan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk

mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan 8 Misi (Asta Cita) yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Misi yang ke 7 yaitu *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penjabaran RPJMD dituangkan ke dalam RKPD, selanjutnya RKPD dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS sehingga setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) Kabupaten Bogor

Keterkaitan Renja 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi Jawa Barat dalam sinkronisasi kebijakan berkaitan dengan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dimaksud, Kementerian Keuangan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- a) Akurasi perencanaan APBN;
- b) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L; serta
- c) Indeks pemerataan keuangan antar daerah.

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kebijakan ini diharapkan berdampak pada peningkatan efektivitas belanja pemerintah dalam pembangunan negara dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan ekonomis. Inisiasi kebijakan ini dilakukan dengan pengalihan belanja K/L yang bersifat konsumtif menjadi belanja produktif sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan pola penyerapan

anggaran yang proporsional sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran, percepatan dalam realisasi belanja negara, dan pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu dan jumlah. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sebagai sarana dalam mengukur capaian atas sasaran strategis perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu akurasi perencanaan APBN dan persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L. Berdasarkan pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah **Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.**

Tabel 1.1
Keterkaitan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dengan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor

Sasaran pada Renstra BKAD Kabupaten Bogor	Sasaran pada Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal; TIK yang andal dan berkualitas; Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif; dan Pencapaian tugas khusus yang efektif
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	

Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Selain itu, misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD yaitu “Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, **pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat**, peningkatan tata kelola



pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.” dengan tujuan nomor dua yaitu “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Sejalan dengan Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD dapat dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Keterkaitan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD dengan Visi Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementrian Dalam Negeri	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD
Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Berdasarkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **misi ke 4**, yaitu :

“Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance”

Dengan tujuan RPJMD yaitu:

“Terciptanya Tranformasi Birokrasi yang Beroreantasi pada Pelayanan Publik yang Bermartabat, Efektif, Efisien, dan Bersih untuk Mewujudkan Ketahanan Daerah”.

Sedangkan Sasran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **sasaran ke 1** yaitu :

“Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif”.

Keterkaitan dengan Langkah Ngawangun Jabar Istimewa yaitu Langkah Ngawangun Jabar Istimewa yang **ke salapan**, yaitu :

“Mendorong peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi birokrasi berdampak.” yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran BPKAD sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat
dengan Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Bogor

Tujuan RPJMD Jawa Barat	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Provinsi Jabar	Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD
Tujuan ke 4, <i>Terciptanya Tranformasi Birokrasi yang Beroreantasi pada Pelayanan Publik yang Bermartabat, Efektif, Efisien, dan Bersih untuk Mewujudkan Ketahanan Daerah</i>	<i>Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif</i>	Indeks Reformasi Birokrasi bidang pengelolaan keuangan adalah opini WTP	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Sumber : BPKAD, diolah , 2025

Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu :

“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah dimaksud seabgai berikut :

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah utara; Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kabupaten Cianjur di

sebelah tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

2. **Istimewa**, singkatan dari **Inspiratif**, **Merakyat** dan **Wibawa**, yang dijelaskan sebagai berikut :

- **Inspiratif** adalah kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor harus dapat menjadi teladan bagi bawahannya serta memberikan inspirasi kepada masyarakat yang dipimpinnya.
- **Merakyat** adalah sosok Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi panutan dan harus mampu menyelesaikan segala bentuk masalah dengan sikap dan perilaku merakyat, dalam arti ramah kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik yang memuaskan masyarakat.
- **Wibawa** adalah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mewujudkan kewibawaan Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan lainnya.

Dengan demikian, **Istimewa** adalah kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.

3. **Gemilang**, merupakan perwujudan kinerja pembangunan daerah selama lima tahun menunjukkan peningkatan (kemajuan) yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan pelampauan dalam pencapaian target kinerja utama daerah.

Adapun Misi Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;

3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah misi ke 1, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”.

f. Tindak lanjut Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD

Semua Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator kinerja serta pendanaan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, akan di tuangkan kedalam Rancangan APBD 2026 yang selanjutnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 24);
43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 44);

44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 105);
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);
46. Peraturan Bupati Bogor No. 16 Tahun 2023 tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 16);
47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Sedangkan **Tujuan** disusunnya Renja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai acuan atau pedoman kerja bagi seluruh unsur BPKAD Kabupaten Bogor sesuai tugas dan fungsinya termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2026.
4. Sebagai acuan bagi pelaksana monitoring dan evaluasi kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bab ini memuat penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, secara garis besar:

- Aturan terkait perencanaan
- Substansi kewenangan bidang urusan/unsur
- Aturan vertikal yang selaras dengan kewenangan
- Aturan lainnya yang terkait dan mutakhir.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Sedangkan Tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari Renja 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

BAB II : Hasil Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

2.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada bagian ini menjelaskan Berupa tujuan, sasaran, program dan kegiatan 5 tahun sebelumnya, hingga tahun 2024 (2020-2024), yang telah dievaluasi pada akhir tahun.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada bagian ini menginformasikan ketercapaian kinerja, tujuan dan sasaran tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada bagian ini menjelaskan mengenai uraian permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang

yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada bagian ini berisi uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Pada bagian ini berisi hasil kajian terhadap usulan program, kegiatan dan subkegiatan para pemangku kepentingan yang terkait dengan kewenangan perangkat daerah.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian ini berisi telaahan keterkaitan antara arah kebijakan and prioritas pembangunan nasional (astalita) serta Provinsi Jawa Barat (salapan langkah) dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta indikatornya.

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pada bagian ini berisi program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Pada bab ini menguraikan rencana kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2026.

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

2.1. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dilakukan dengan cara mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, serta pemenuhan kesesuaian standar akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023. Sedangkan untuk Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, didasarkan pada ketentuan:

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan sebesar 100 %.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase (%) capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.1
Rentang Capaian Indikator Kinerja Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 2.2
Rentang Capaian Indikator Kinerja Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Berdasarkan Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, pada Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel di Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BPKAD yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Penetapan APBD dengan target kinerja 100 % (Tepat Waktu) dengan realisasi Tepat Waktu atau 100%
2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100% dengan realisasi 100%.
3. Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target 100% dengan realisasi 100%.

Hal ini dapat dijabarkan pada Tabel berikut :



Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD pada Tahun 2020

NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)
				2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)*100
	TAHUN 2020					
	IKU					
	TUJUAN :					
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
1.	SASARAN 1 :					
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan APBD	Waktu	Tepat	Tepat	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100	100	100
2	SASARAN 2 :					
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100	100	100

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Berdasarkan Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 BPKAD Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel di Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BPKAD yaitu : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, dan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Penetapan APBD dengan target kinerja “100 % (Tepat Waktu) dengan realisasi Tepat Waktu atau 100%;
2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100% dengan realisasi 100%;
3. Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target 100% dengan realisasi 100%.

Hal ini dapat dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja (IKU) BPKAD pada Tahun 2021-2023

NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14=(11/8)*100	15=(12/9)*100	16=(13/10)*100
	IKU											
	TUJUAN :											
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemenuhan Kriteria WTP	Kriteria	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
	SASARAN 1 :											
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
	SASARAN 2 :											
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026, pada Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel di Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BPKAD yaitu : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, dan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Ketepatan Penetapan APBD dengan target kinerja 100 % (Tepat Waktu)
- 2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi
- 3. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Tabel 2.5
Realisasi IKU BPKAD pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024
					%
1	2	3	4	5	6
SASARAN 1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas				
1	Ketepatan Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00
2	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi		90,28	93,06	103,08
SASARAN 2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib				
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi		90,28	86,11	95,38

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis *Badan* Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.1
Capaian Sasaran Strategis 1

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas memiliki 2 capaian sesuai indikator sasaran strategis yaitu Ketepatan Penetapan APBD dengan capaian 100% dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi dengan capaian 103,08%.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.2
Ketepatan Penetapan APBD

Ketepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah yang harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah beberapa aspek yang menentukan ketepatan penetapan APBD:

a) Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

APBD harus disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b) Ketepatan Waktu dalam Penyusunan dan Penetapan

APBD harus ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan siklus perencanaan keuangan daerah. Keterlambatan dalam penetapan dapat berdampak pada terhambatnya program pembangunan dan pelayanan publik.

c) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah

APBD harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah, seperti:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Ketepatan ini memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

d) Prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik

Ketepatan penetapan APBD juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Forum konsultasi publik
- Penyampaian rancangan APBD secara terbuka

e) Efisiensi dan Efektivitas Penganggaran

APBD harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta memastikan bahwa belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f) Pengawasan dan Evaluasi

Proses pengawasan oleh DPRD, BPK, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan penetapan APBD. Evaluasi terhadap realisasi APBD perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target yang telah direncanakan.

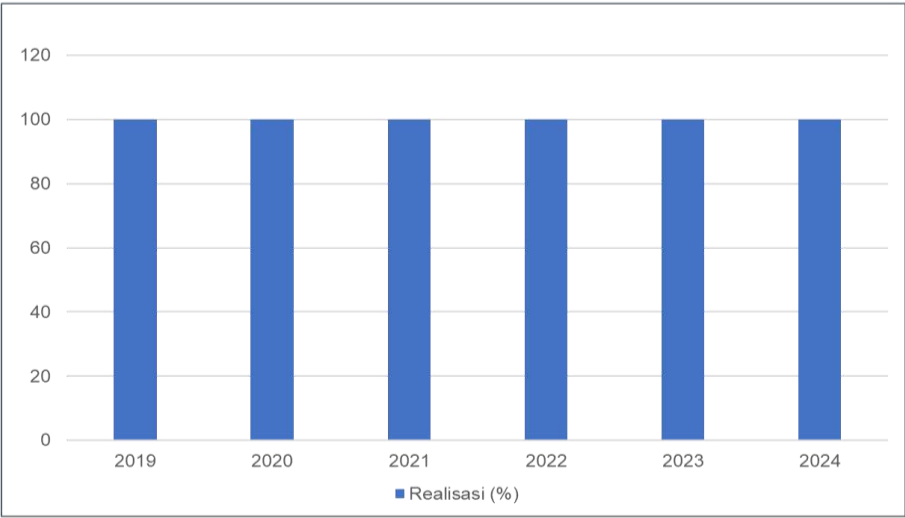
Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, penetapan APBD dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dari segi realisasi, Ketepatan Penetapan APBD sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Ketepatan Penetapan APBD sama dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 adalah Tepat Waktu dan pada tahun 2024 adalah Tepat Waktu.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.4
Perkembangan Ketepatan Penetapan APBD Tahun 2019-2024

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dampak terlihat konsisten di angka 100% selama beberapa tahun berturut-turut (2019-2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai sepenuhnya setiap tahunnya tanpa adanya perubahan signifikan. Menunjukkan kinerja yang konsisten dengan target yang stabil dan realistis.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Gambar di atas menampilkan pencapaian kinerja tahun 2024 terkait ketepatan penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Capaian 2024 - Ketepatan Penetapan APBD**
 - Target yang ditetapkan adalah **tepat waktu**.
 - Realisasi yang dicapai juga **tepat waktu**, sesuai target.
 - Tingkat pencapaian adalah **100%**, artinya target berhasil dicapai sepenuhnya.
- 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra**
 - Target tahun 2024 adalah **tepat waktu** dalam penetapan APBD.
 - Capaian terhadap target Rencana Strategis (Renstra) juga **100%**, artinya seluruh target yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra berhasil dipenuhi.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Ketepatan Penetapan APBD Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 100% dari target akhir RENSTRA Tepat

Waktu dan terealisasi Tepat Waktu pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penetapan APBD tahun 2024 berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi

Ketepatan **penetapan** APBD Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Kondisi dan Karakteristik Daerah

Setiap daerah memiliki kondisi fiskal, dinamika politik, serta kapasitas administrasi yang berbeda dalam menetapkan APBD. Hal ini membuat perbandingan dengan rata-rata nasional/provinsi menjadi kurang relevan.

2. Regulasi dan Kebijakan yang Berbeda

Terkadang, ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau regulasi baru yang memengaruhi proses penetapan APBD di suatu daerah, sementara daerah lain mungkin tidak terdampak.

3. Variasi Proses dan Waktu Pembahasan

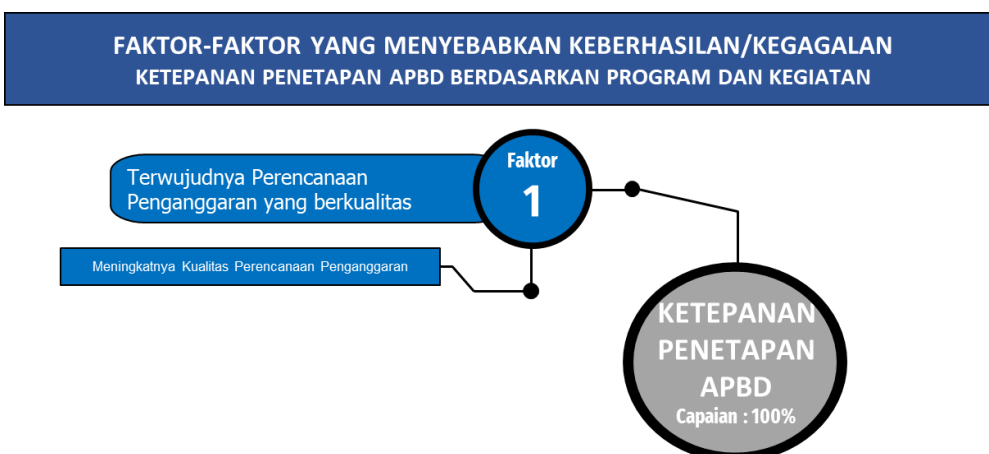
Setiap daerah memiliki dinamika dalam pembahasan APBD, termasuk perbedaan dalam kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Faktor keterlambatan seperti pembahasan yang alot, revisi

berkali-kali, atau perubahan asumsi makro ekonomi bisa berbeda di tiap daerah.

4. Tidak Ada Standar Seragam dalam Pengukuran Ketepatan

Ketepatan waktu penetapan APBD bisa dihitung berdasarkan tanggal tertentu, tetapi dalam praktiknya, daerah mungkin memiliki perbedaan prosedural atau penyesuaian yang membuat perbandingan dengan rata-rata nasional/provinsi tidak sepenuhnya valid.

Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional/provinsi karena berbagai faktor, capaian 100% dalam ketepatan penetapan APBD tetap menjadi indikator keberhasilan daerah dalam perencanaan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan dalam menjalankan program pembangunan.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.7
Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD

Gambar di atas merupakan faktor utama yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan dalam penetapan APBD. Perencanaan penganggaran yang baik dan berkualitas menjadi dasar utama keberhasilan ketepatan waktu penetapan APBD. Artinya, dengan adanya perencanaan yang baik, penetapan APBD berhasil dilakukan tepat waktu dengan tingkat keberhasilan 100%.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.8
Faktor Lainnya Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Ketepatan Penetapan APBD

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian Ketepatan Penetapan APBD meliputi:

1. Perencanaan Anggaran yang Baik

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Menjadwalkan penyusunan dan pembahasan anggaran dengan batas waktu yang jelas.
- Penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD yang matang dan tepat waktu.

2. Kordinasi eksekutif-legislatif yang efektif

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Penyelarasan Waktu Pelaksanaan Pembahasan APBD dengan jadwal Reses DPRD
- Membangun kesepahaman sejak awal tentang prioritas pembangunan daerah

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Pelatihan dan workshop berkala tentang pengelolaan keuangan daerah

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran
- Evaluasi berkala terhadap regulasi yang berpengaruh pada penyusunan APBD

5. Transparansi Publik

Upaya yang dilakukan yaitu:

- Memanfaatkan platform digital untuk mempublikasikan rancangan APBD

Berdasarkan hasil rekomendasi Bapedalitbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) **Ketepatan Penetapan APBD** tidak berlaku lagi karena dari hasil rekomendasi, Ketepatan Penetapan APBD udah termasuk ke dalam IKU **“Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi”**.

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan. Kepatuhan ini dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.9
Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

a) Kepatuhan terhadap Regulasi

- Mengacu pada kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memastikan bahwa kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

b) Proses Penganggaran dan Perencanaan

- Penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
- Adanya keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran melalui Musrenbang.

c) Pelaksanaan Anggaran

- Penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

d) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- Adanya mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah untuk memastikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan lainnya.

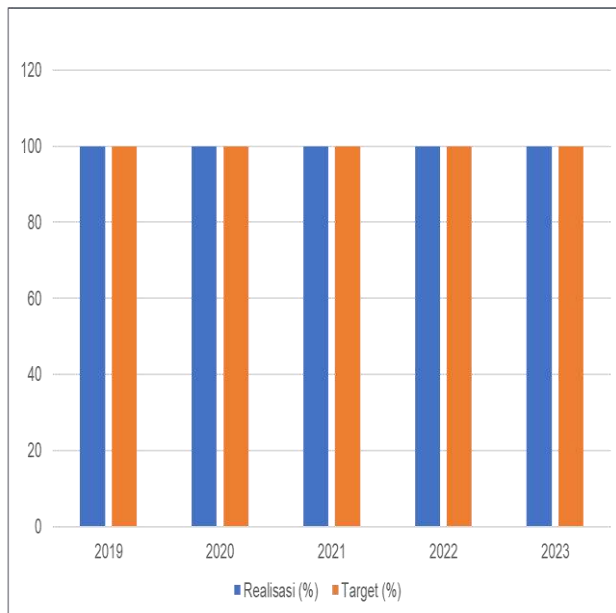
e) Evaluasi dan Pengawasan

- Pemeriksaan berkala oleh BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Penggunaan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

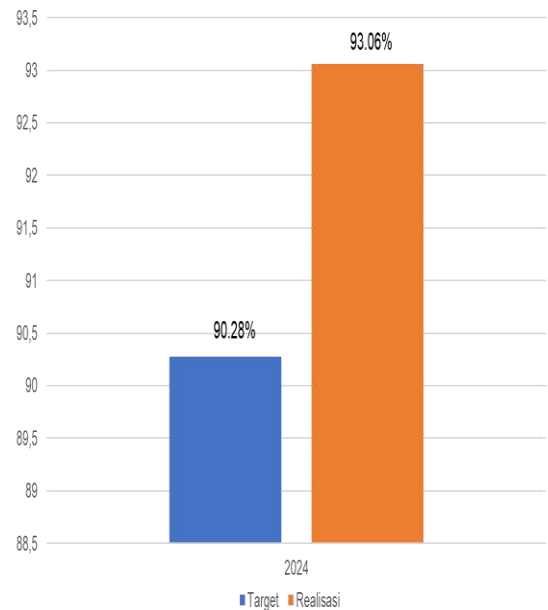
Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi administratif, penurunan opini BPK, atau bahkan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan capaian **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi** Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 103.08% dari target 90.28% dan terealisasi sebesar 93.06%.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya
IKU 2019-2023 - Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya
IKU 2024 - Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi



Sumber: Renstra Tahun 2024-2026



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 :

Realisasi 2023	Realisasi lebih baik/buruk
0,00	0.00
Capaian 2023	Capaian lebih baik/buruk
0,00	0,00

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator, pada tahun sebelumnya memiliki indikator “**Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP**”, sedangkan mulai tahun 2024 indikator tersebut diganti dengan “**Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**”. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari:

1. Perbedaan Definisi dan Fokus Indikator

Indikator yang digunakan pada tahun sebelumnya, yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP," lebih mengarah pada aspek kepatuhan administratif dan kesesuaian prosedural dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Artinya, indikator ini mengukur sejauh mana perangkat daerah mampu memenuhi standar akuntansi yang berlaku (SAP).

Sementara itu, indikator yang digunakan mulai tahun 2024, yaitu "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi," mengukur kepatuhan terhadap kebijakan yang lebih luas terkait pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, yang melibatkan bukan hanya laporan keuangan tetapi juga implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Meskipun keduanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keduanya memiliki aspek yang berbeda dalam pengukuran dan cakupan yang dinilai, yang mengarah pada pengukuran yang berbeda pula. Oleh karena itu, meskipun keduanya tercapai lebih melebihi target yang ditentukan, perbedaan fokus dan definisi indikator ini membuat hasilnya sulit untuk dibandingkan secara langsung.

2. Tujuan dan Sasaran yang Berbeda

Meskipun keduanya menilai kinerja di bidang pengelolaan keuangan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai juga dapat berbeda. Indikator pertama fokus pada pencapaian standar akuntansi, sedangkan indikator kedua berfokus pada kepatuhan terhadap kebijakan yang lebih luas, yang bisa mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, meskipun hasil capaian di atas 100% menunjukkan keberhasilan, perbandingan langsung antara kedua indikator tersebut tidak dapat menggambarkan kesetaraan hasil secara objektif.

Dari segi realisasi, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi mencapai 93,06% dari target 90,28%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki indikator yang berbeda.

Meskipun indikator yang digunakan pada berbeda, pencapaian sudah mencapai target yang ditentukan, keduanya menandakan keberhasilan dalam mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga memberikan gambaran positif terhadap kinerja yang dicapai.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 9,15% dari target akhir RENSTRA sebesar 92,00% dan terealisasi 93,06% pada tahun 2024. Pencapaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 yang melebihi target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap berbagai aspek, antara lain:

1. Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah:

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:

Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan akuntabilitas ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD. Peningkatan efisiensi ini termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.

4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan:

Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten

Indikator Kinerja Utama **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi”** Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Karakteristik dan Kapasitas Fiskal Daerah

Setiap daerah memiliki struktur keuangan yang berbeda, termasuk sumber pendapatan, tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat, dan kapasitas dalam mengelola anggaran. Hal ini membuat standar kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung.

2. Variasi Implementasi Kebijakan di Setiap Daerah

Meskipun regulasi pengelolaan keuangan daerah bersifat nasional, penerapan di masing-masing daerah dapat berbeda tergantung pada kualitas tata kelola, kesiapan sistem, serta sumber daya manusia yang tersedia.

3. Perbedaan Mekanisme Evaluasi dan Pengukuran

- Beberapa daerah mungkin memiliki sistem audit dan pengawasan internal yang lebih ketat dibandingkan daerah lain.
- Standar dan metode yang digunakan dalam mengukur kepatuhan bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga hasilnya tidak selalu sebanding.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian **100% dengan realisasi 93,06% dari target 90,28%** tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan **kepatuhan yang tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola keuangan yang optimal**.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.13
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Faktor yang menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan Berdasarkan Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi” adalah:

Faktor 1: Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang Berkualitas

Kualitas perencanaan penganggaran menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang baik menghasilkan program dan kegiatan yang realistis, efektif, dan efisien.

Program pendukung:

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran melalui penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai regulasi, berbasis data, dan berorientasi hasil.

Faktor 2: Terwujudnya Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu

Penatausahaan keuangan yang dilakukan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai standar akan mendukung transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.

Kegiatan pendukung:

Penatausahaan Keuangan Daerah Memenuhi Standar, seperti pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar, yaitu penggunaan dan pelaporan dana bantuan yang tepat sasaran dan akuntabel.

Faktor 3: Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Berkualitas

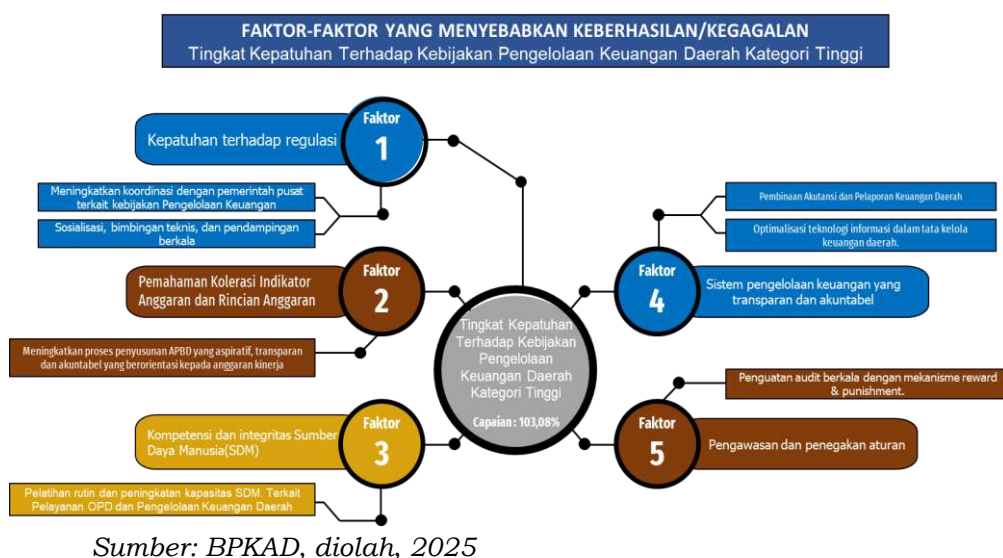
Laporan yang akurat, tepat waktu, dan informatif sangat penting dalam menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Program/Kegiatan pendukung:

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Lingkup Keuangan Daerah, guna mendukung penyusunan laporan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Adapun Faktor-faktor pendukung lainnya yang bisa menjadi penyebab Keberhasilan/Kegagalan adalah:



Gambar 2.14
Faktor Lain yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1. Kepatuhan terhadap regulasi

Faktor pertama mencakup pentingnya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Solusi yang diberikan adalah sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan berkala untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terkait aturan yang berlaku.

2. Pemahaman Koresi Indikator Anggaran dan Rincian Anggaran

Faktor kedua menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai indikator dan rincian anggaran. Untuk mencapainya, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD serta kinerja yang jelas terkait anggaran.

3. Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor ketiga berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan rutin dan penguatan kapasitas menjadi upaya utama yang disarankan..

4. Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Faktor keempat menekankan pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini disarankan untuk melakukan optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengawasan dan Penegakan Aturan

Faktor kelima berhubungan dengan penguatan mekanisme pengawasan dan audit. Diperlukan audit yang berkala dengan adanya mekanisme reward dan punishment untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi” terkait evaluasi Kinerja, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan terlampir.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.15
Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi meliputi:

1. Meningkatkan Standar Kinerja

- Dengan menaikkan target, pemerintah daerah lebih terdorong untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah.

2. Konsistensi dengan Tren Peningkatan

- Tren capaian menunjukkan perbaikan, sehingga target yang lebih tinggi lebih realistis dibanding mempertahankan angka di bawah realisasi sebelumnya.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

- Target yang lebih tinggi akan memotivasi peningkatan pengawasan, pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

4. Optimalisasi Sistem dan Teknologi Informasi



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.16
Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori tinggi mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi regulasi yang berlaku dalam pengelolaan aset daerah. Kepatuhan ini mencakup aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, serta penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Bogor No. 16 Tahun 2023 Tentang Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus atau Barang Spesifik

Prinsip utama dalam pengelolaan BMD mencakup kepatuhan terhadap prosedur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.

- **Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMD**

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD dapat diukur berdasarkan aspek berikut :

- **Perencanaan dan Pengadaan**

- Kesesuaian pengadaan BMD dengan kebutuhan dan prioritas daerah
- Kepatuhan terhadap proses perencanaan anggaran
- Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku

- **Pencatatan dan Inventarisasi**

- Ketaatan dalam mencatat dan melaporkan aset daerah
- Kelengkapan dokumen administrasi barang milik daerah
- Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah

- **Pemanfaatan dan Pemeliharaan**

- Kepatuhan terhadap prosedur pemanfaatan barang milik daerah
- Kepatuhan terhadap pemeliharaan aset agar tetap dalam kondisi baik
- Efektivitas dalam penggunaan aset untuk kepentingan pelayanan publik

- **Pemindahtanganan dan Penghapusan**

- Prosedur pemindahtanganan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Ketepatan dalam proses penghapusan aset yang sudah tidak digunakan
- Kepatuhan terhadap mekanisme lelang atau hibah barang milik daerah

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tinggi untuk tahun **2024**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Kepatuhan: 95,38%

- Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD sudah mencapai 95,38% dari target yang ditetapkan.
 - Angka ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam penerapan kebijakan terkait aset daerah.

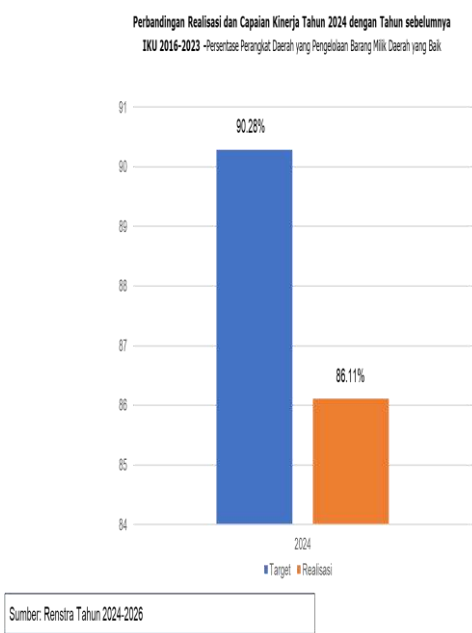
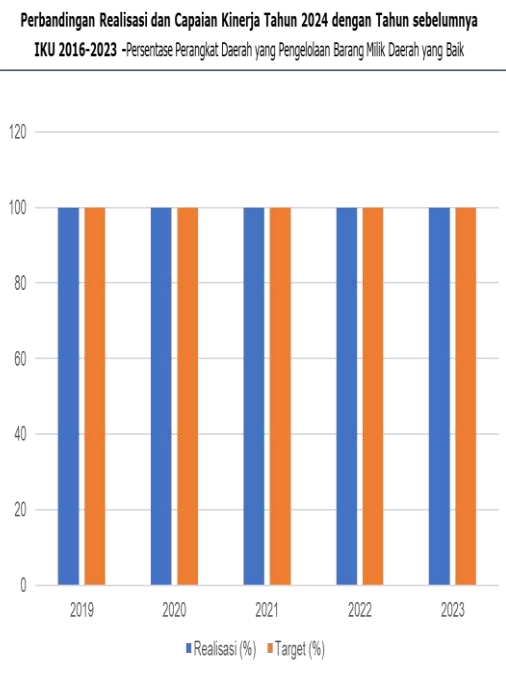
2. Target: 90,28

- Target awal yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 90,28.
- Artinya, pemerintah daerah berharap tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD minimal berada pada angka tersebut.

3. Realisasi: 86,11

- Realisasi aktual dari kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD adalah 86,11.
- Meskipun sudah cukup tinggi, realisasi ini masih berada di bawah target yang telah ditentukan.

Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dalam **efektivitas pengelolaan APBD, kepatuhan regulasi, transparansi, serta optimalisasi aset daerah**. Kondisi ini mencerminkan bahwa tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.17
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Dari segi realisasi, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi mencapai 86.11% dari target 90,28%. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator pada tahun sebelumnya.

- **Indikator lama ("Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD yang Baik") lebih berorientasi pada jumlah OPD yang mampu mengelola BMD dengan baik**, tetapi tidak mengukur kepatuhan terhadap regulasi secara menyeluruh.
- **Indikator baru ("Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan BMD Kategori Tinggi") lebih fokus pada kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku**, mencerminkan sejauh mana regulasi ditaati.

Perbandingan **Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dilakukan** perbandingan secara langsung karena terdapat **perbedaan indikator kinerja** yang digunakan pada masing-masing tahun.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi” Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 1.78% dari target akhir RENSTRA sebesar 93.60% dan terealisasi 86.11% pada tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Bogor. Terdapat peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan pengelolaan BMD, yang menunjukkan efektivitas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan selama periode perencanaan. **Secara agregat, target RENSTRA telah terlampaui**, meskipun pada tahun 2024 sendiri, target tahunan belum sepenuhnya

tercapai. Realisasi 2024 kurang dari target, maka akan diadakan evaluasi dan perbaikan di aspek regulasi, sistem, SDM, dan koordinasi antar OPD.

Penguatan pengawasan, digitalisasi, dan pelatihan SDM juga akan **dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD, serta penggunaan sistem informasi pengelolaan aset daerah akan lebih dimaksimalkan, sehingga pencatatan dan pelaporan aset daerah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan real-time. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan dapat meningkat dan target yang ditetapkan di tahun berikutnya dapat tercapai.**



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten

Indikator Kinerja Utama **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi”** Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi dikarenakan memiliki karena beberapa alasan berikut:

1. **Perbedaan Indikator dan Kriteria:** Setiap daerah mungkin menggunakan indikator atau kriteria yang berbeda dalam mengukur tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. **Regulasi dan Kebijakan yang Berbeda:** Setiap daerah memiliki kebijakan dan regulasi pengelolaan barang milik daerah yang bisa bervariasi, tergantung pada peraturan daerah masing-masing.
3. **Metodologi Pengukuran yang Berbeda:** Daerah dapat menggunakan metode yang berbeda dalam mengukur dan melaporkan tingkat kepatuhan, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan secara langsung.

4. **Faktor Sumber Daya dan Infrastruktur:** Sumber daya dan kapasitas daerah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat mempengaruhi hasil pengukuran kepatuhan yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.
5. **Tahapan Implementasi yang Berbeda:** Beberapa daerah mungkin masih dalam tahap awal penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, sementara daerah lain sudah lebih maju dalam implementasinya.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian 95,38% dengan realisasi 86,11% dari target 90,28% tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan kepatuhan yang tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola Barang Milik Daerah yang optimal.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.20
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Pengelolaan BMD yang berkualitas mencerminkan bahwa seluruh proses perencanaan, penatausahaan, hingga pemanfaatan aset daerah dilaksanakan secara tertib, sesuai aturan, dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk menjaga nilai aset daerah serta menjamin transparansi dan efisiensi dalam pemanfaatannya.

Komponen yang Mendukung:

- Perencanaan Barang Milik Daerah Memenuhi Standar
 - Pengadaan dan perencanaan aset daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, mendukung pelayanan publik, dan memperhatikan efisiensi anggaran.

- Penatausahaan Barang Milik Daerah Memenuhi Standar
 - Meliputi pencatatan, penginventarisasian, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri dan sistem aplikasi yang ditetapkan pemerintah (misalnya SIMDA BMD atau SIPKD).
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - Aset daerah dimanfaatkan sesuai regulasi, baik dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, atau bentuk lainnya yang sah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa melanggar aturan.

Adapun Faktor-faktor lain yang menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi”



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.21
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan keberhasilan atau gagalnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1. Kepatuhan terhadap Regulasi

Faktor pertama menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mencapainya, diperlukan:

- Koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengelolaan BMD.

- Komitmen pimpinan dalam menjalankan dan menerapkan regulasi dengan baik.

2. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Efisien**

Agar aset daerah dapat dikelola secara optimal, dibutuhkan:

- Rekonsiliasi jadwal pemeliharaan, pencatatan, dan pelaporan BMD secara rutin dan tepat waktu.
- Ketepatan penyampaian laporan BMD oleh perangkat daerah untuk meningkatkan akuntabilitas.

3. **Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan:

- Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam pelayanan OPD dan pengelolaan keuangan daerah.
- Komitmen pengguna dan pengurus barang dalam merencanakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sesuai ketentuan.

4. **Sistem Pengelolaan Aset yang Terintegrasi**

Pengelolaan aset yang efektif membutuhkan sistem yang baik, yaitu melalui:

- Pembinaan sistem pengelolaan BMD agar lebih terstruktur dan efisien.
- Optimalisasi sistem manajemen aset berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.

5. **Pengawasan dan Penegakan Aturan**

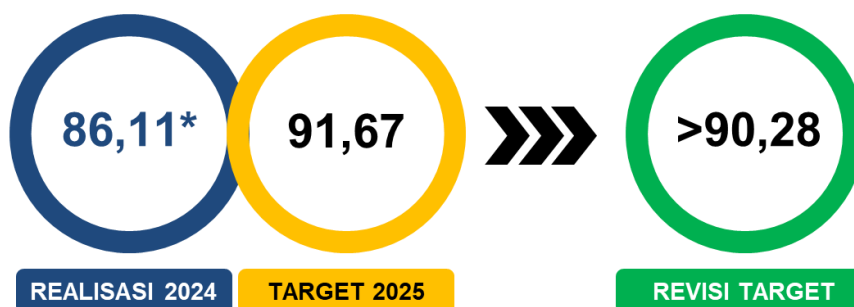
Agar kebijakan pengelolaan aset daerah berjalan dengan baik, perlu dilakukan:

- Ketepatan penyampaian laporan BMD oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pengawasan.
- Penguatan audit berkala dengan menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan.

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi” terkait Pelaksanaan Sosialisasi, Rekonsiliasi BMD dan Upaya pencapaian melalui *reward and punishment* terlampir.

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.22
Rekomendasi Penyesuaian Target IKU

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi meliputi :

- 1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi**
 - Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan Barang Milik Daerah.
 - Meningkatkan sosialisasi regulasi kepada seluruh perangkat daerah.
- 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Lebih Efektif**
 - Menyusun jadwal pemeliharaan yang lebih terstruktur dan memastikan pencatatan yang lebih akurat.
 - Meningkatkan ketepatan penyampaian laporan BMD secara rutin dan tepat waktu.
- 3. Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**
 - Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan aset daerah.
 - Menguatkan komitmen pengguna dan pengelola barang dalam merencanakan kebutuhan aset sesuai regulasi.
- 4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Aset Berbasis Teknologi**
 - Meningkatkan penggunaan sistem manajemen aset yang lebih modern dan berbasis digital.
 - Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap implementasi sistem pengelolaan BMD yang sudah ada.
- 5. Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat**
 - Melakukan audit berkala dengan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan.



Mengoptimalkan peran pengawasan internal dalam memastikan pengelolaan BMD sesuai ketentuan.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga target yang direvisi untuk tahun 2025 dapat tercapai dengan lebih baik.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD s/d Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2021 s.d 2023

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN										
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemenuhan Kriteria WTP	Kriteria	4	4	100,00%	4	4	100,00%	4	4	100,00%
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN										
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Tepat /Tidak Tepat	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100,00%	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100,00%	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100,00%
		2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%

Sumber : BPKAD, diolah, 2025



Tabel 2.7
Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2024

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6	7
TUJUAN	INDIKATOR SASARAN					
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Keterpenuhan Kriteria WTP	Kriteria	4	4	100,00%
		1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan				
		2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures)				
		3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
		4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)					
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan penetapan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100,00%
	2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	90,28	93,06	103,08
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	90,28	86,11	95,38

Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Tabel 2.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
05		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
05	02	KEUANGAN								
05	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	-	9.74	4.42	5.08	
			2. Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	-	78.52	68.32	62.29		
			3. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	-	14.12	9.51	10.52		
			4. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-	5.79	6.00	4.64		
			Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Status				Tepat Waktu	Tepat Waktu	100.00
			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen				97.00	97.00	100.00
			Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Status				Tepat Waktu	Tepat Waktu	100.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
05 02 02 2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah	Dokumen	2	2	2	4	4	4	100.00
05 02 02 2.01 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100.00
	02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100.00
	03 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	72	72	72	72	100.00
	04 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	72	72	72	72	100.00
	05 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	72	72	72	72	100.00
	06 Sub Kegiatan Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	72	72	72	72	72	100.00
	07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perda	1	1	1	1	1	1	100.00
			Dokumen Perbup	2	2	2	2	2	2	100.00
	08 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen Perda	1	1	1	1	1	1	100.00
			Dokumen Perbup	2	2	2	2	2	2	100.00
	09 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rancangan dan Keputusan Bupati	70	50	50	50	50	50	100.00
	10 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100.00



Kode Rekening				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
							Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1				2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
				11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	100.00
				12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	1	1	1	1	100.00
05	02	02	2.02		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%	99.94	99.91	99.99	100	100	100.00
05	02	02	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	-	1	1	1	1	100.00
				03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	2,803	1,500	700	500	500	100.00
				04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2	2	1	1	1	100.00
				05	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	-	12	12	12	12	100.00
				06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	8	8	7	6	6	100.00
				07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Dokumen	-	1	1	0	0	0.00



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	-	1	1	0	0	0	0.00
	09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
	10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
	11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	592	72	72	300	300	300	100.00
05	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
				Persentase Dana Transfer dan Bantuan Keuangan						
				-	100	100	100	100	100	100.00
	08	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	-	1	1	1	1	1	100.00
	09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	-	1	1	1	1	1	100.00
	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	-	1	1	1	1	1	100.00



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
								Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1					2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
05	02	02	2.03		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100.00
05	02	02	2.03	01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	100.00
				03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	17	18	18	18	18	18	100.00
				04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	-	1	1	1	1	1	100.00
				05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen Raperda	1	1	1	1	1	1	100.00
						Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Raperbup	1	1	1	1	1	1	0.00
				06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
				07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	12	100.00
				09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Raperbup	1	1	1	2	2	2	100.00
				11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	72	72	72	72	100.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
05 02 02 2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
05 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	100.00
	02 Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	100.00
	03 Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	160	72	72	72	72	72	100.00
05 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Ya/Tidak	-	Ya	Ya	Ya			
		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	%					90	90	100.00
05 02 03 2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik di Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100.00
05 02 03 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen Rancangan Perbup	2	2	2	2	2	2	100.00
	02 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100.00
	03 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100.00
	04 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rancangan Perbup	2	1	-	-	-	-	0.00



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
								Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realiasi %
1					2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
				05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	2	1	1	1	1	100.00
				06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	3	1	1	1	1	1	100.00
				07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	100.00
				08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	-	1	1	1	1	1	100.00
				09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	1	4	1	1	1	100.00
				10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	380	1,945	1498	1	1	1	100.00
				11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik daerah	Laporan	-	2	2	2	2	2	100.00
				12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	2	100.00
				13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang	72	72	72	72	72	72	100.00
05	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100.00
05	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	24	29	32	35	35	35	100.00
05	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	4	7	7	7	100.00



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
								Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realiasi %
1					2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
				02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
				03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
				05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	100.00
				06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	7	7	7	7	7	100.00
				07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	16	17	17	17	17	100.00
05	02	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	5	10	30	30	30	30	100.00
05	02	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	89	93	97	97	97	97	100.00
				03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100.00
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi	Laporan	1	1	2	2	2	2	100.00
06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	1	-	-	-	-	0.00
07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	24	24	24	24	24	100.00
08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100.00
05 02 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	2	2	2	100.00
05 02 1 2.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	100.00
	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	100.00
05 02 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100.00
05 02 01 2.05	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut	paket	-	-	3	-	-	-	0.00
	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	1	1	1	100.00



Kode Rekening				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
							Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1				2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	1	1	100.00
				05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	93	93	100.00
				09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	-	-	20	66	93	70.97
05	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100	100.00
05	02	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	1	1	100.00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	100.00
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	6	6	6	6	6	100.00
				05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	100.00
				06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	100.00
				08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang terlayani	Laporan	12	12	12	12	12	100.00
				09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :	Laporan	199	182	184	157	167	94.01
					- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Laporan	89	92	92	90	90	100.00
					- Perjalanan Dinas Luar Daerah		Laporan	110	90	92	67	77	87.01



Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
								Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1					2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
05	02	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan Umum Perangkat daerah dilaksanakan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100.00
05	02	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan (roda 4 dan roda 2)	Unit	9	9	9	41	41	41	100.00
				10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia	Unit	-	-	5	5	5	5	100.00
				11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Tersedia	Unit	-	-	5	5	5	5	100.00
05	02	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100.00
05	02	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa surat menyurat	Laporan	12	12	12	12	12	12	100.00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	12	12	12	100.00
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	-	12	12	12	12	12	100.00
05	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100.00
05	02	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Kendaraan roda 4) :	Unit	11	11	11	11	11	11	100.00
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara dibayarkan Pajak dan perizinan :	Unit	57	57	57	57	57	57	100.00
						- Kendaraan Roda 2	Unit	39	39	39	39	39	39	
						- Kendaraan Roda 4 lapangan	Unit	18	18	18	18	18	18	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Grand Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	6	7	8	10	9	10	11=(10/9)*100
	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	Unit	2	2	2	2	2	100.00
	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	2	2	2	2	100.00
	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor, dan Bangunan lainnya yang di pelihara/ rehab	Unit	3	3	3	3	3	100.00
	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	100.00
	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	3	3	3	3	3	100.00

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.166.458.422.237,44 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Empat Sen). Besarnya APBD ini dialokasikan untuk mendanai pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh 72 (tujuh puluh dua) perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren daerah, baik wajib maupun pilihan.

Hal-hal yang dapat digambarkan dari kondisi keuangan daerah selama tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas 3 kompoten utama, yaitu 1) pendapatan asli daerah, 2) pendapatan transfer, 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara umum target pendapatan daerah mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,59 persen. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Realisasi pendapatan ada yang melampaui target, dan ada juga yang tidak mencapai target. Tidak tercapainya target pendapatan daerah terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan transfer, baik dari pusat maupun dari provinsi Jawa Barat yang rata-rata hanya terealisasi sebesar 96,8 persen.

Komponen pendapatan daerah terbesar masih didominasi oleh pendapatan transfer, terutama pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Total pendapatan transfer menempati porsi melebihi 50 persen dari total pendapatan daerah. Urutan kedua dikontribusi oleh pendapatan asli daerah sebesar 37-41 persen, dan sisanya berasal dari kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 4 komponen, yaitu :

- 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang

sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah hingga tahun 2024 telah mencapai 41,42 persen terhadap total pendapatan daerah. Jika dilihat dari nominal kontribusi, pajak daerah merupakan kontributor tertinggi, disusul Lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang paling rendah adalah retribusi daerah. Jika dilihat dari laju pertumbuhan, nilai terbesar dikontribusi oleh Lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, dan terakhir adalah retribusi daerah.

Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah. Tahun 2024, kontribusi terhadap PAD telah mencapai 69,56 persen terhadap total PAD. Pajak daerah setiap tahun mengalami *over target* dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,75 persen selama kurun waktu 5 tahun. Tahun 2019 merupakan tahun terjadinya *over target* pajak daerah tertinggi, yaitu sebesar 121,54 persen, namun menurun saat masa pandemi covid-19 hingga tahun 2023. Adanya *over target* pajak menunjukkan optimisme daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, dan dapat diupayakan melalui serangkaian kebijakan daerah pada periode jangka waktu pembangunan jangka menengah selanjutnya.

Kontribusi kedua terbesar pada pendapatan asli daerah disumbang oleh lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2024, besarnya realisasi kontribusi Lain-lain PAD yang Sah tercatat 25,42 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,3 persen selama kurun waktu 5 tahun. Dalam komponen pendapatan asli daerah, lain-lain PAD yang sah memiliki pertumbuhan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komponen-komponen yang menjadi bagian penting dalam menciptakan pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah masih optimis untuk ditingkatkan.

Hingga tahun 2024, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi sebesar 1,89 persen terhadap PAD. Adapun dalam kurun waktu lima tahun, pertumbuhan pendapatan komponen ini tercatat sebesar 7,29 persen. Angka

ini masih menunjukkan adanya optimisme dalam peningkatan pendapatan dari komponen ini.

Retribusi daerah merupakan komponen yang paling rendah kontribusinya terhadap PAD. Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun, terjadi perlambatan pertumbuhan sebesar 2,90 persen. Realisasi selama lima tahun selalu berada di bawah target. Tahun 2023, kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 3,12 persen. Rendahnya kontribusi retribusi daerah dipengaruhi oleh kebijakan nasional di lingkup komponen retribusi daerah serta upaya peningkatan target yang diproyeksi oleh perangkat daerah penanggung jawab retribusi daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terbagi atas 2 (dua) komponen yaitu 1) transfer pemerintah pusat dan 2) transfer pemerintah provinsi. Secara umum, pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,13 persen dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2024, komposisi pendapatan transfer terhadap total pendapatan tercatat sebesar 58,58 persen. Realisasi pendapatan transfer tiap tahun selalu berada di bawah target, yaitu hanya berkisar antara 97-98 persen, bahkan tahun 2020, hanya terealisasi sebesar 91,26 persen akibat pandemi covid-19.

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pendapatan terbesar yang berkontribusi dalam pendapatan transfer, meskipun rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 5,69 persen, masih lebih kecil dari pendapatan transfer dari pemerintah provinsi yang mencapai 7,57 persen. Pada tahun 2023, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai 46,22 persen terhadap total pendapatan transfer, dan sisanya dikontribusi oleh pendapatan transfer pemerintah provinsi. Diharapkan dengan adanya perubahan pada komponen pendapatan transfer provinsi, akan meningkatkan pendapatan transfer pada tahun-tahun mendatang.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan negatif dalam kurun waktu lima tahun, dengan rata-rata sebesar 58,69 persen. Pada tahun 2023, kontribusi komponen ini terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 0,14 persen, meskipun realisasi tahunan selalu *over target*, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi covid-19.

BPKAD mengelola pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Hasil Retribusi Daerah diperoleh dari pendayagunaan atas BMD yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan pemerintah daerah memperoleh pembayaran retribusi yang langsung dibayarkan ke Kas Daerah. Sedangkan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diantaranya berasal dari Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro dan Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD.

Pendapatan Transfer yang semula di kelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, jadi Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD selaku SKPD dan BPKAD selaku SKPKD adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2020 s.d Tahun 2024

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2020	242.369.402.546	164.091.558.019	67,70
2021	5.795.297.845.586	5.493.099.152.911	94,79
2022	5.838.841.578.726	5.447.918.711.709	93.30
2023	6.199.632.243.580	5.832.826.638.287	94,08
2024	6.651.000.567.141	6.413.535.300.763	96,42

Sumber : BPKAD, diolah, 2025



Untuk capaian realisasi pendapatan dari tahun 2020 s.d tahun 2024 mengalami peningkatan.

Perkembangan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2020 s.d tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD
Tahun 2020 s.d Tahun 2024

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2020	1.899.478.805.481	1.803.208.524.281	94,93
2021	1.548.823.343.205	1.524.192.399.934	98,41
2022	1.640.780.958.210	1.597.872.233.276	97.38
2023	1.736.364.940.284	1.702.146.252.003	98.03
2024	1.760.981.431.276	1.746.526.545.202	99,17

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Perkembangan anggaran belanja BPKAD dari tahun 2020 s.d tahun 2024 kecenderungannya meningkat dimana rata-rata pertumbuhan anggaran belanja BPKAD sebesar 20,00%. Pada tahun 2020 ada kenaikan yang sangat signifikan karena adanya belanja untuk penanganan Covid-19.



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.23
Pertumbuhan Anggaran Belanja BPKAD 2020-2024

Untuk capaian realisasi anggaran ada peningkatan secara signifikan dari Tahun 2019 s.d Tahun 2024 sebagaimana table di bawah ini :



Tabel 2.11
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BPKAD TAHUN 2020-2024

Uraian	2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited			2023 Audited			2024 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah															
Pendapatan Asli Daerah	2,660	4,270	160.53	354,747	130,388	36.76	402,263	158,233	39.34	356,406	128,001	35.91	301,949	163,525	54.16
Hasil Retribusi Daerah	1,677	2,569	153.19	2,633	2,699	102.51	2,734	3,377	123.52	2,734	2,918	106.73	2,518	3,634	144.32
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00	64,272	71,304	0,00	74,195	75,860	102.24	76,280	76,241	99.95	77,598	79,015	101.83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	983	1701	0,00	287,842	56,385	0,00	325,334	78,996	24.28	277,392	48,842	17.61	221,833	80,876	36.46
Pendapatan Transfer	0	0	0,00	4,813,212	4,729,476	98.26	5,430,955	5,282,559	97.27	5,830,275	5,691,706	97.62	6,349,050	6,240,272	98.29
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0	0,00	3,083,609	3,065,553	99.41	3,745,851	3,601,509	96.15	0	0	0	0	0	0
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0	0	0,00	598,660	598,314	99.94	568,915	568,003	99.84	4,581,602	4,501,677	98.26	5,108,721	5,046,513	98.78
Transfer Pemerintah Provinsi	0	0	0,00	1,130,943	1,065,609	94.22	1,116,189	1,113,047	99.72	1,248,673	1,190,029	95.30	1,240,329	1,193,759	96.25
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0,00	627,338	633,235	100.94	5,623	10,708	190.43	12,950	13,988	108.02	-	9,737	0,00
Pendapatan Hibah	0	0	0,00	30,230	36,127	119.51	5,623	10,708	190.43	12,950	13,988	108.02	0	9,737	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	597,108	597,108	100.00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Pendapatan Daerah	2,660	4,270	160.53	5,795,297	5,493,099	94.79	5,838,841	5,451,500	93.37	6,199,631	5,833,695	94.10	6,650,999	6,413,534	96.43
Realisasi Anggaran dalam 000.000															
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020-2024															



Tabel 2.12
REALISASI ANGGARAN BELANJA BPKAD TAHUN 2020-2024

Uraian	2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited			2023 Audited			2024 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	49,279	44,210	89.71	39,251	37,747	96.17	47,372	42,706	90.15	55,631	43,530	78.25	54,301	51,179	94.25
Belanja Pegawai	29,626	27,393	92.46	22,255	22,033	99.00	28,035	25,466	90.84	33,573	23,978	71.42	27,742	26,763	96.47
Belanja Barang Dan Jasa	19,653	16,817	85.57	16,996	15,714	92.46	19,337	17,240	89.16	22,058	19,552	88.64	26,559	24,416	91.93
Belanja Modal	7,892	6,718	85.12	1,080	1,005	93.06	1,550	1,261	81.35	4,159	4,022	96.71	9,654	9,306	96.40
Belanja Peralatan Dan Mesin	7,510	6,350	84.55	846	773	91.37	1,007	900	89.37	3,827	3,691	96.45	9,067	8,726	96.24
Belanja Gedung Dan Bangunan	367	355	96.73	14.0	14.0	100.00	318	312	98.11	221	220	99.55	301	294	97.67
Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan	15	13	86.67	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00	220	218	99.09	225	49	21.78	111	111	100.00	286	286	100.00
Belanja Tidak Terduga	0	0	0.00	90,785	75,948	83.66	59,532	30,229	50.78	53,099	52,261	98.42	34,889	32,871	94.22
Belanja Tidak Terduga	0	0	0.00	90,785	75,948	83.66	59,532	30,229	50.78	53,099	52,261	98.42	34,889	32,871	94.22
Belanja Transfer	0	0	0.00	1,417,714	1,409,487	99.42	1,532,325	1,523,675	99.44	1,623,475	1,602,333	98.70	1,662,135	1,653,166	99.46
Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa	0	0	0.00	166,155	166,155	100	222,435	222,278	99.93	227,553	227,375	99.92	249,965	248,982	99.61
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0.00	1,251,559	1,243,332	99.34	1,309,890	1,301,397	99.35	1,395,922	1,374,958	98.50	1,412,170	1,404,184	99.43
Total Belanja Daerah	57,171	50,928	89.08	1,548,830	1,524,187	98.41	1,640,779	1,597,871	97.38	1,736,364	1,702,146	98.03	1,760,979	1,746,522	99.18
Realisasi Anggaran dalam 000.000															
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020-2024															

▪ **Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021, 2022, dan 2023**

Dalam mendukung pencapaian program unggulan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023, berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor *mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.*

Sesuai kewenangan BPKAD sebagai SKPKD, melaksanakan hal hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer.

Pada Tahun 2021 Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi *pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa terealisasi* sebanyak 414 desa dari target 416 desa atau sebesar 99,52 dikarenakan ada 2 desa yang tidak mengajukan proposal. Pada Tahun 2022 pencapaian realisasinya sebanyak 412 desa dari target 415 desa atau sebesar 99,28 hal ini dikarenakan adanya 3 Desa yang tidak mencairkan baik di Tahap I dan Tahap II yaitu Desa Raga Jaya di kecamatan Bojonggede, Desa Cidokom di Kecamatan Rumpin dan Desa Pasirlaja di Kecamatan Sukaraja. Pada Tahun 2023 pencapaian realisasinya sebanyak 405 desa dari target 416 desa atau sebesar 97,36 hal ini

dikarenakan adanya 11 Desa yang tidak mengusulkan proposal dan tidak mencairkan baik di Tahap I dan Tahap II. Pada kegiatan ini untuk pelaksana teknis dan administrasinya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

Sedangkan pencapaian melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi : *Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama* realisasi tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 adalah 100%.

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pemerintah Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat dijabarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2023

NO	KARSA BOGOR	PD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB-SUB KEGIATAN	SATUAN	VOLUME (TAHUN 2020)			VOLUME (TAHUN 2021)			VOLUME (TAHUN 2022)			VOLUME (TAHUN 2023)		
								TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MEMBANGUN																		
1	Meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus - satu miliar satu desa (samisade)	Desa	-	-	-	416	414	99.52	416	414	99.52	416	405	97.36
	BERKEADABAN																		
12	Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan umum - Alokasi Dana Desa (ADD):													
						1. Insentif RT / RW	org	18,938	18,938	100.00	19,075	19,075	100.00	19,075	19,075	100.00	19,235	19,235	100.00
						2. Insentif Anggota Linmas	org	4,160	4,160	100.00	4,160	4,160	100.00	4,160	4,160	100.00	4,160	4,160	100.00
						3. Insentif guru ngaji	org	10,400	10,400	100.00	10,400	10,400	100.00	10,400	10,400	100.00	10,400	10,400	100.00
						4. Operasional Posyandu	lembaga	4,770	4,770	100.00	4,770	4,770	100.00	4,770	4,770	100.00	4,834	4,834	100.00

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Pada Tahun 2024 Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa terealisasi sebanyak 414 desa dari target 416 desa atau sebesar 99,51 dikarenakan ada 2 desa yang tidak mengajukan proposal.

Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi : Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama realisasi

Hasil pencapaian penyaluran bantuan keuangan pemanfaatan infrastruktur dan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama Tahun 2024 dapat dijabarkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.14
Pencapaian realisasi bantuan keuangan Tahun 2024

NO	BANTUAN KEUANGAN	PD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB-SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2024			KET.
								TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	Meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus - satu miliar satu desa (samisade)	Desa	416	414	99,52	Ada 2 Desa yang tidak mengusulkan proposal
2	Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Umum yang termasuk Program Pancakarsa					
						1. Insentif RT / RW	Orang	19.354	19.354	100,00	
						2. Insentif Anggota Linmas	Orang	4.160	4.160	100,00	
						3. Insentif guru ngaji	Orang	10.400	10.400	100,00	
						4. Operasional Posyandu	Lembaga	4.839	4.839	100,00	

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Renstra 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, pada Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel* dengan Indikator Tujuan yaitu Pemenuhan kriteria WTP. Dan juga telah menetapkan Sasaran Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BPKAD yaitu :

- 1) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Ketepatan Penetapan APBD dengan target kinerja 100 % (Tepat Waktu);
 - b. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi dengan target kinerja 90,23 % ;
- 2) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut :
 - Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi dengan target kinerja 90,23 %.

❖ Pengukuran Kinerja

Pencapaian secara keseluruhan pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat diuraikan pada Tabel berikut :



Tabel 2.15
Pengukuran Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	100 %	100 %
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	90,23 %	93,67 %
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	90,23%	86,11 %

----- Rata-rata Capain Indikator Kinerja 100%

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Tabel 2.16
Pengukuran Indikator Kinerja Penunjang BPKAD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %
1.	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai Akip	BB	BB

----- Rata-rata Capain Indikator Kinerja 100%

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

2.2.1. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan **“berhasil”** yaitu capaian rata-ratanya 100,00% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikator kinerja capaian tahun 2024 terhadap capaian Akhir Renstra 2026 adalah sebagai berikut :



Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas

Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. **Pertanggungjawaban** yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses **manajerial**, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat **pengawas** fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar, Hal ini tak lepas dari **berkualitasnya** Laporan keuangan yang di sajikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Tabel 2.17
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap Tahun akhir Renstra 2023
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	100 %	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Rata-Rata Capaian						100 %	100 %

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas di Perangkat Daerah



Tahun 2021, 2022, dan 2023 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Ketepatan Penetapan APBD dimana dalam penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021, 2022, dan 2023 realisasinya 100.00% (Tepat Waktu) dari target 100.00% Tepat Waktu ;
2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100,00% (72 Perangkat Daerah) realisasinya 100.00%;

Berdasarkan Renstra 2024-2026 BPKAD ada perubahan Indikator Kinerja Utama yaitu **Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP** berubah menjadi **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**.

Rumus Hitung :

Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah

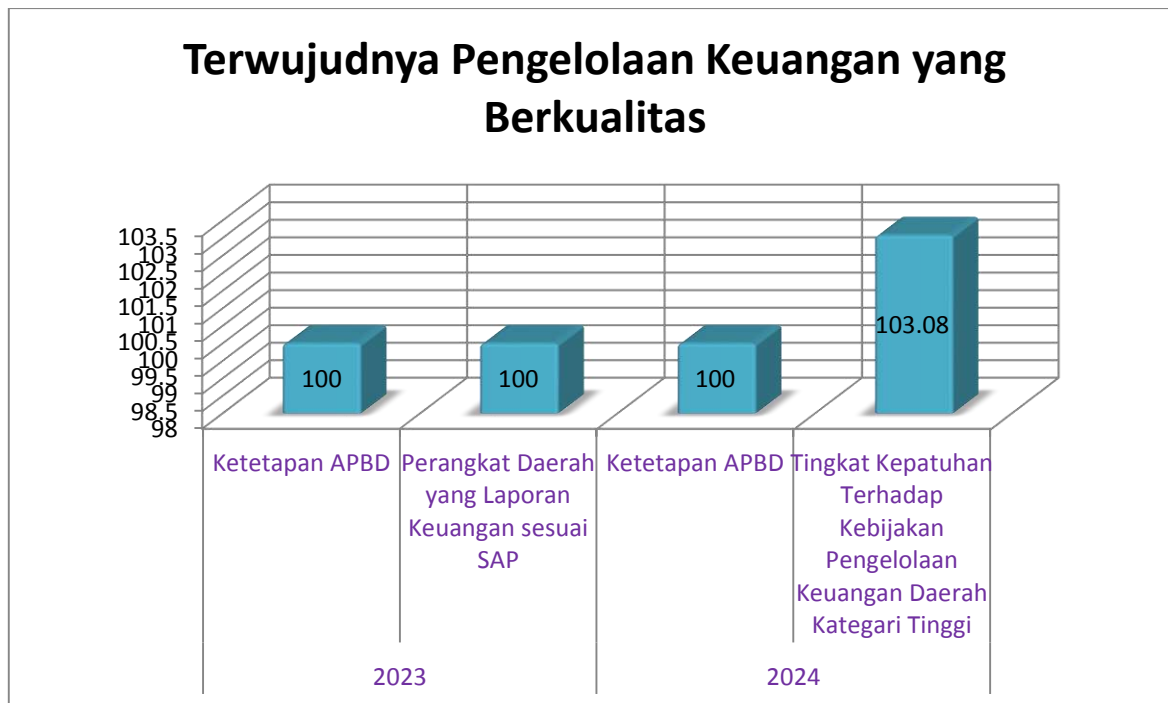
----- x 100

Jumlah Perangkat Daerah

Tabel 2.18
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Capaian 2024 terhadap akhir Renstra Tahun 2026
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	100 %	100 %
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	%	90,28 %	93,06%	103,08 %	97,11 %
Rata-Rata Capaian					101,54 %	101,54 %	98,56 %

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.24
Diagram Capaian Kinerja Sasaran 1

❖ **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama yaitu Ketepatan Penetapan APBD**

Capaian IKU yang pertama yaitu Ketepatan Penetapan APBD dihasilkan pada Ketepatan Penetapan APBD dengan mempedomani Permendagri Nomor 13 tahun 2016 pasal 116 ayat 2 tentang Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menetapkan Perda APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 31 Desember 2023, jadi tercapai realisasi atau 100,00%, dan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024, jadi tercapai realisasi atau 100,00%.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Ketepatan Penetapan APBD didukung melalui pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Capaian IKU kedua di dihasilkan dari pengukuran Perangkat Daerah melalui aplikasi SIPERJAKA dimana terdapat 4 aspek yang diukur tingkat kepatuhan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengelolaan aset daerah. Dari hasil pengekururan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah ada 67 SKPD yang memperoleh nilai sangat baik atau kategori tinggi dari 72 SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga realisasinya **tercapai** sebesar 103,08 %.

Tanel 2.19
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	% Perangkat Daerah	100 % 72	100 % 72	100 % 72	100 % 72	100 %
		Rata-Rata Capaian					100 %	100 %

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

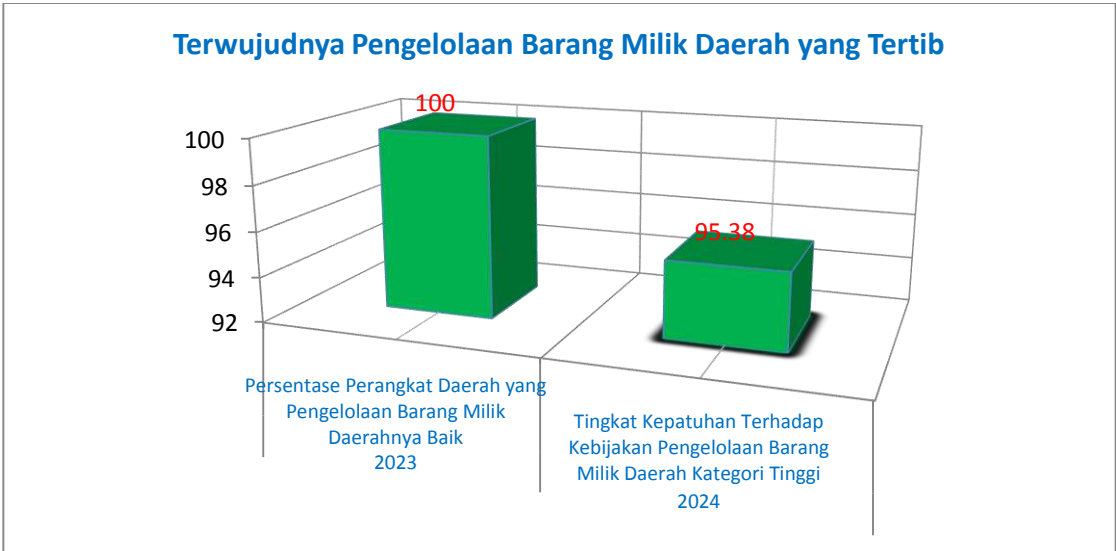
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk *Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah* Tahun 2021, 2022, dan 2023 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: *Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik*, realisasinya 100 % dari target 100 %. Berdasarkan Renstra 2024-2026 BPKAD ada perubahan Indikator Kinerja Utama yaitu *Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik* berubah menjadi *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi*.

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$$

Tabel 2.20
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Capaian 2024 terhadap akhir Renstra Tahun 2026
				Target	Realisasi	Capaian	Realisasi
1.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	%	90,28 %	86,11 %	95,38 %	93,93 %
Rata-Rata Capaian						95,38 %	93,93 %

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.25
Grafik Terwujudnya Pengelolaan BMD yang Tertib

I. **Capaian Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik**

Capaian IKU ketiga dihasilkan dari Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik sesuai dengan hasil Monitoring terhadap Laporan KIB (Kartu Inventaris Barang) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 72 SKPD, pengelolaan Barang Milik Daerahnya telah dinilai Baik, berhasil **tercapai** realisasinya atau 100%.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik

Didukung melalui 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah realisasinya 100 % dari target 100 %.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), yaitu memiliki fungsi pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. BPKAD mempedomani upaya pencapaian sasaran tersebut, dengan melakukan penyusunan perencanaan lima tahunan (Renstra) dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKAD. Selain itu upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPKAD telah menampilkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan pada website resmi pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, maka penetapan Peraturan Daerah tentang APBD senantiasa diupayakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 80,12 poin. Artinya bahwa kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024 dinilai baik.

Kinerja program yang perlu ditingkatkan adalah Program

Pengelolaan Barang Milik Daerah karena tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi belum optimal.

Secara umum dalam pelaksanaan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bogor masih belum optimal yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih kurangnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan system manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Meningkatnya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman idiologi serta kerukunan beragama.

Selain itu juga BPKAD sebagai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berperan besar untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah serta penatausahaan barang daerah. Implikasinya, BPKAD harus mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pengamanan dan pemanfaatan serta penatausahaan barang daerah yang digunakan masing-masing SKPD untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Isu-isu penting Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor antara lain :

- a. Pengelolaan Anggaran yang efisien dan akuntabel
- b. Optimalisasi Aset Daerah
- c. Peningkatan Kinerja dan Transfaransi

Isu-isu penting memerlukan penanganan secara komprehensif yang mencakup arah strategi organisasi, rencana program kerja dan

rencana sumber pendanaan program. Beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh BPKAD untuk mengakomodir isu-isu penting diatas dalam melaksanakan pelayanan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas;
2. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasiskan e-government dengan digitalisasi yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;
3. Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor;
5. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tabel 2.21
Pemetaan Analisa SWOT BPKAD

INTERNAL	EKSTERNAL
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai	1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah	
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislatif	2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Bogor



INTERNAL	EKSTERNAL
4. Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah dan terintegrasi antar SKPD dengan BPKAD selaku SKPKD	3. Dekatnya Ibukota Kabupaten Bogor dengan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi yang memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan barang daerah
5. Tersedianya aplikasi pengelolaan barang daerah sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan BPKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah)	
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Terbatasnya Kualitas SDM pengelola keuangan dan barang daerah yang menguasai Akuntansi	1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah
2. Belum terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan beban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah secara optimal	3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antar Perangkat Daerah /Kecamatan
	4. Mutasi pegawai sering terjadi
	5. Kurang optimalnya pengetahuan ASN tentang keuangan pemerintahan dan terbatasnya SDM yang dimiliki Perangkat Daerah

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Berdasarkan tabel pemetaan tersebut, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas.

Strategi S-O

Strategi S-O merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-O yang diterapkan yaitu penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara online dan terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.

Strategi W-O

Strategi W-O merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi W-O yang diterapkan yaitu peningkatan kapabilitas pegawai.

Strategi S-T

Strategi S-T merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. Strategi S-T yang diterapkan yaitu peningkatan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Strategi W-T

Strategi W-T merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat menanggulangi ancaman yang ada. Strategi W-T yang diterapkan yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada di daerah seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Dari Tabel Analisis SWOT, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yaitu :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia dari berbagai disiplin ilmu, namun jumlahnya pada BPKAD secara kuantitas masih kurang dan kualitas pegawai belum memadai secara merata;
2. Lokasi Kabupaten Bogor yang strategis yaitu dekat dengan Pusat Pemerintahan maupun Pemerintah Propinsi namun perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sangat dinamis;
3. Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD ataupun Pengelola BMD, namun kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi dalam penginputan data dan pelaporannya, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal;
4. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data namun kemampuan SDM yang tidak merata di Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta adanya mutasi/rotasi/promosi SDM pengelola keuangan dan BMD;

5. Adanya aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD ataupun Pengelola BMD namun kemampuan SDM yang tidak merata di Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta adanya mutasi/rotasi/ promosi SDM pengelola keuangan dan BMD sehingga pengelolaan keuangan dan BMD belum optimal;
6. Pengetahuan dan Kemampuan SDM yang tidak merata pada Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan pada Isu strategis Provinsi Jawa Barat tersebut, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Isu Strategis ke 6 (enam) yaitu **“Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”**.

Dari tujuh isu strategis RPJMD Kabupaten Bogor, isu penting yang berkaitan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah isu strategis ke 7 (tujuh), yaitu **“Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan”**.

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, maka diperlukan peningkatan kompetensi dan kualitas Aparatur Sipil Negara, peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan integrasi antar sektor.

Dari isu strategis *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan* di jabarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor menjadi 1 (satu) isu strategis yaitu :

- *Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Belum Optimal;*

Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.22
Isu Strategis BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2026

URUSAN / UNSUR		:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
BIDANG URUSAN / UNSUR		:	KEUANGAN		
PERANGKAT DAERAH		:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3		4	
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum optimal	Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja		Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah	
		Meningkatkan perencanaan pengelolaan keuangan daerah melalui Ssosialisasi regulasi dan pembinaan		Melakukan sosialisasi mengenai regulasi dan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai perencanaan pengelolaan keuangan daerah	
		Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima		Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	
		Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor			
		Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah		Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai penatusahaan keuangan pemerintah daerah	
		Meningkatkan Sistem Pengelolaan Kepegawain Berbasis IT yang Efektif		Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah berkenaan dengan gaji dan tunjangan	
		Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif		Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Belum terintegrasi antara sistem informasi akuntansi dengan aset		Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor	



NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD	Penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan peraturan perundang- undangan
		Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima	Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah
		Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset	Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor
		Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel	
		Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah	Melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor
		Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif	Optimalisasi aplikasi ATISISBADA dan terintegrasi
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima	Melakukan standarisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aset Daerah
		Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder yang terkait	Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja.

Pelaksanaan review terhadap Rancangan Renja 2026 yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Renja 2026 dengan analisis hasil kebutuhan dapat dijelas pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.23
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Keuangan
Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Waktu	Tepat Waktu	2,000,822,241,997	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Waktu	Tepat Waktu	1,650,543,751,556	
			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	Persen	100				Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	Persen	100		
			Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	100				Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Panganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	4,728,061,592	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Panganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	5,583,692,888	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	446,502,030	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	676,145,820	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	457,309,080	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	678,716,214	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	⁷²	82,701,673	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	⁷²	160,151,129	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	⁷²	118,787,204	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	⁷²	193,760,128	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	²	1,105,356,475	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	²	1,374,737,270	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	²	1,248,804,263	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	²	1,253,506,965	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	⁵⁰	290,079,620	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	⁵⁰	503,801,474	
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	¹	85,686,081	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	¹	107,041,362	
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	¹	237,484,392	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	¹	244,958,513	



NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	655,350,774	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	390,874,013	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	1,548,181,516	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	2,420,236,643	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	341,528,091	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	357,321,770	
	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	5	61,002,645	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	5	397,607,416	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	171,636,566	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	216,395,603	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	5	204,215,411	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	5	287,651,238	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	159,104,999	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	275,115,760	



NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	354,455,896	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	636,783,866	
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	228	256,237,908	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	228	249,360,990	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	Persen	100	1,129,788,343	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	Persen	100	1,382,188,639	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	238,256,995	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	223,566,114	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	19	277,106,486	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	19	327,685,722	
	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	82,885,957	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	91,890,570	



NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	140,263,638	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	217,161,720	
	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	82,583,399	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	102,313,812	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2	63,467,517	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2	81,666,079	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	158,606,997	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	184,172,573	
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	86,617,353	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	153,732,049	



NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	1,992,560,211,126	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	1,640,023,659,922	
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1,652,969,177,402	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1,257,065,232,006	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	103,149,011,250	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	103,149,011,250	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	236,442,022,474	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	279,809,416,666	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	Persen	100	855,999,420	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	Persen	100	1,133,973,464	
	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	54,341,862	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	97,326,045	
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	541,636,459	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	529,287,613	



NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	⁷²	260,021,098	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	⁷²	507,359,806	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	2,409,105,650	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100.00	2,880,175,367	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	2,409,105,650	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100.00	2,880,175,367	
			Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya sesuai ketentuan	Persen	100				Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya sesuai ketentuan	Persen	100		
			Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100				Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100		
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	²	263,954,232	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	²	255,680,730	
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	²	77,875,156	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	²	133,278,510	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	¹	230,848,687	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	¹	276,905,688	



NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	55,347,586	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	105,057,407	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	240,531,046	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	189,510,418	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	91,558,519	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	183,153,278	
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	438,635,920	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	510,420,534	
	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	172,087,524	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	239,374,617	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	203,413,448	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	206,021,196	
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	222,102,097	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	286,482,611	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	99,496,932	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	128,500,707	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	249,099,423	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	250,129,843	
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	64,155,081	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	115,659,828	
JUMLAH						2,049,411,580,435						1,702,385,399,452	

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Dari hasil review persandingan dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Jumlah program pada Rancangan Awal Renja 2026 sebanyak 3 program dan hasil analisis kebutuhan sebanyak 3 program.
- Jumlah kegiatan pada Rancangan Awal Renja 2026 sebanyak 14 kegiatan dan hasil analisis kebutuhan sebanyak 14 kegiatan
- Jumlah subkegiatan pada Rancangan Awal Renja 2026 sebanyak 86 subkegiatan dan hasil analisis kebutuhan sebanyak 86 subkegiatan.
- Jumlah anggaran pada Rancangan Awal Renja 2026 sebesar Rp. 2.049.411.580.435,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 1.702.385.399.452,-

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, untuk perencanaan tahun 2026 ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun para stakeholder lainnya yang masuk pada kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yaitu usulan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk 416 desa.

Sedangkan hasil penyelarasan masukan dari para stakeholder melalui Forum Perangkat Daerah ataupun usulan pada forum-forum resmi lainnya terhadap program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2026 menunjukkan tidak ada perubahan pada usulan awal sehingga rumusan kebutuhan program dan kegiatan sama dengan rancangan awal Renja BPKAD Tahun 2026, sebagaimana Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.24
Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Bogor

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	100	Persen	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	100	Persen	
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	Bantuan Infrastruktur Desa (416 Desa)

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), serta (iii) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (iv) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat dalam sinkronisasi kebijakan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.***
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan 8 Misi (Asta Cita) yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Misi yang ke 7 yaitu *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.*

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi peiaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, hasil evaluasi kinerja RKPD, prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif (Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembanguann, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kapaitas masyarakat sipil).

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu dilakukan pemetaan antara tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Adapun telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi ditampilkan pada Tabel berikut :



Tabel 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA	SINERGI DENGAN BIDANG URUSAN
1	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas (Kemenkeu) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif (Kemenkeu) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah : (i) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investas (Kemendagri)	Ururusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Kesesuaian antara capaian BPKAD dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2025-2029 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yaitu "Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi Kemenkeu yaitu: 1) Merumuskan dan mengelola

kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi, 2) Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional, 3) Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat, 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel dan inovatif, 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kementerian Keuangan Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Keuangan
Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif.
2.	Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional	Pendapatan negara yang maksimal dan berkeadilan
3.	Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat	Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas
4.	Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik	Pengelolaan perbendaharaan yang modern; pengelolaan kekayaan negara yang produktif; serta pengelolaan pembiayaan yang kreatif dan risiko yang prudent
5.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.	Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal; TIK yang andal dan berkualitas; Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif; dan Pencapaian tugas khusus yang efektif

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Adanya keterkaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dengan Renstra Kementerian Keuangan yaitu sasaran strategis nomor 5 yaitu Birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang optimal; TIK yang andal dan berkualitas; Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif; dan Pencapaian tugas khusus yang efektif

Visi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2025-2029 sejalan dengan Visi Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemendagri akan menjalankan 9 Misi Presiden tersebut, dengan fokus pada penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan peningkatan sinergi pemerintahan serta pembangunan daerah dan desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi "*Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat* (Trantibumlinmas) dengan tujuan nomor dua yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2025- 2029 adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) dan untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan sasaran strategis meliputi: Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan

dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9).

Adanya keterkaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dengan Renstra K/L vertikal dan Renstra BKAD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.3
Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SINERGI DENGAN BIDANG URUSAN
1	<i>Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance</i>	Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Sinergi Bidang Urusan Keuangan dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **misi ke 4**, yaitu :

“Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance”

Dengan tujuan RPJMD yaitu :

“Terciptanya Transformasi Birokrasi yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Bermartabat, Efektif, Efisien, dan Bersih untuk Mewujudkan Ketahanan Daerah”.

Sedangkan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah **sasaran ke 1** yaitu :

“Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif”.

Keterkaitan dengan Langkah Ngawangun Jabar Istimewa yaitu Langkah Ngawangun Jabar Istimewa yang **ke salapan**, yaitu :

“Mendorong peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi birokrasi berdampak.”

Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu :

“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah dimaksud sebagai berikut :

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di bagian Barat, Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah Utara; Kabupaten Karawang di sebelah Timur, Kabupaten Cianjur di sebelah Tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah Selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah Barat. Kabupaten Bogor memiliki semboyan **“Prayoga, Tohaga, Sayaga” - “Kuta Udaya Wangsa”**. Prayoga artinya Utama, Tohaga artinya Kokoh dan Kuat, Sayaga artinya Sedia atau Siap Siaga, yang memiliki makna pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor hendaknya selalu mengutamakan kekokohan, kuat pada pendirian dan perjuangannya serta selalu siap siaga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai cita-cita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara Kuta artinya Kota, Udaya artinya Fajar atau Kebangkitan, Wangsa artinya Bangsa atau Suku Bangsa, yang memiliki makna bahwa Kabupaten Bogor dengan dukungan masyarakatnya akan menjadi pusat kebangkitan bagi perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa.

2. **Istimewa**, singkatan dari **Inspiratif**, **Merakyat** dan **Wibawa**, yang dijelaskan sebagai berikut :

- **Inspiratif** adalah kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor harus dapat menjadi teladan bagi bawahannya serta memberikan inspirasi kepada masyarakat yang dipimpinnya.
- **Merakyat** adalah sosok Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi panutan dan harus mampu menyelesaikan segala bentuk masalah dengan sikap dan perilaku merakyat, dalam arti ramah kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik yang memuaskan masyarakat.
- **Wibawa** adalah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mewujudkan kewibawaan Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan lainnya.

Dengan demikian, **Istimewa** adalah kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.

3. **Gemilang**, merupakan perwujudan kinerja pembangunan daerah selama lima tahun menunjukkan peningkatan (kemajuan) yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan pelampauan dalam pencapaian target kinerja utama daerah.

Adapun sinergi visi Kabupaten Bogor dengan nasional dan Jawa Barat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sanding Visi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor
dalam Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Visi Nasional	Visi Jawa Barat	Visi Kabupaten Bogor
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata	Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang
Arti Visi:	Arti Visi:	Arti Visi:
Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.	Istimewa: - situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. - situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastuktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.	Istimewa: kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik. Gemilang: kinerja pemerintah daerah yang selalu menunjukkan hasil terbaik serta mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Sumber: BPKAD, diolah, 2025



Adapun **Misi** Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun sinergi dan keterkaitan misi nasional (asta cita), Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sanding Misi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029

Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Jawa Barat	Misi Kabupaten Bogor
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; 3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; 4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.	1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik; 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju; 3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan; 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.



Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Jawa Barat	Misi Kabupaten Bogor
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut serta keselarasannya dengan rumusan misi nasional dan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Baik, selaras dengan misi ketujuh Nasional dan misi keempat Jawa Barat.*
2. **Misi kedua**, yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, selaras dengan misi kedua, ketiga, kelima dan keenam Nasional serta misi kedua Jawa Barat.
3. **Misi ketiga**, yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, selaras dengan misi kedelapan Nasional, serta misi kedua Jawa Barat.
4. **Misi keempat**, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, selaras dengan misi kesatu, keempat dan kedelapan Nasional, serta misi kesatu Jawa Barat.

5. **Misi kelima**, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, selaras dengan misi ketiga, keenam dan kedelapan Nasional, serta misi kedua dan ketiga Jawa Barat.

Berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **Misi ke 1**, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”.

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang berkaitan dengan langsung dengan tupoksi BPKAD adalah *Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi* dengan **Indikator Sasaran** yaitu **Nilai SAKIP**.

Indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 dan berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan								
Indikator Tujuan RPJMD	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,15	86,85	87,12	88,18	89,46	90,94	91,74
Sasaran RPJMD : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi								
Indikator Sasaran RPJMD	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai SAKIP	Predikat	69,38	69,80	70,09	70,25	70,60	71,50	72,30

Sumber: BPKAD, diolah, 2025

Tujuan RPJMD

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Tujuan RPJMD

Indeks Refromasi Birokrasi

Sasaran RPJMD

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi

Indikator Sasaran RPJMD

Nilai SAKIP

Tujuan BPKAD

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Indikator Tujuan BPKAD

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran BPKAD

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Indikator Sasaran BPKAD (IKU)

1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi
2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi

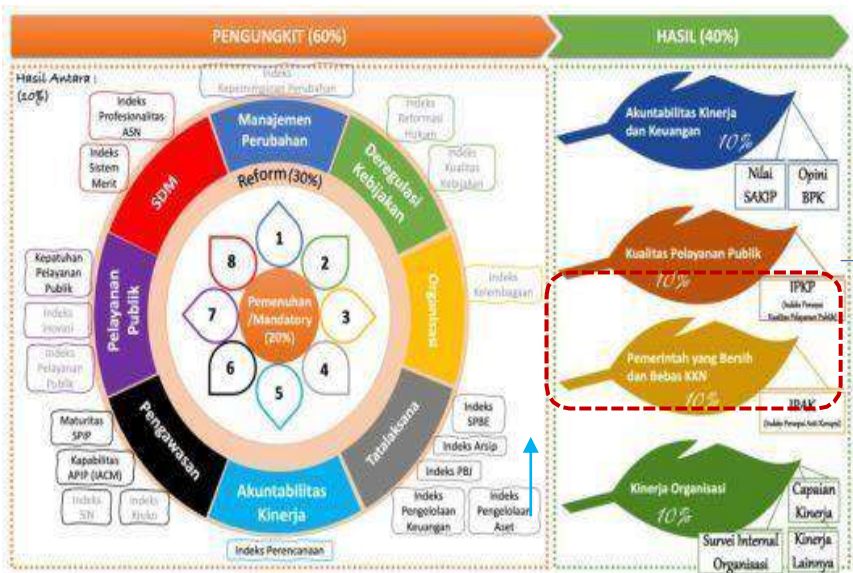
Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Gambar 3.1

Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025-2029

Pengertian dari Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkar tinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.

Selain itu, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut



Sumber : Permenpan RB No. 26 Tahun 2020

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Reformasi birokrasi dilaksanakan di segala aspek, salah satunya adalah aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan. Salah satu tolak ukur penilaian atas pengelolaan keuangan yang baik adalah diperolehnya opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor dan Opini WTP dari BPK atas LKPD juga sebagai salah satu unsur penilaian indeks reformasi birokrasi.

Salah satu wujud tata kelola keuangan organisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memedomani RKPD, terkait dukungan terhadap :

1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026;
2. Keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat.

Prioritas Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah *Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin pemerintahan yang bersih dan tanpa KKN* melalui :

- a) *Transformasi Layanan Pemerintahan Berbasis Digital*;
- b) Akselerasi Pembangunan Pedesaan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang ke-1 yaitu ***Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin pemerintahan yang bersih dan tanpa KKN***. Urusan Bidang Keuangan, Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital;
2. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran mengacu pada arah kebijakan pemerintah daerah yang ke-1 yaitu *Penguatan tata kelola pemerintahan digital*.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah keterkaitan antara Program Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan

dokumen RKPD dan Renstra BPKAD 2025-2029 dapat di jelaskan oleh tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Keterkaitan Program Tahun 2026 BPKAD terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tepat Waktu	Status	1,650,543,751,556
			Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	100	Persen	
			Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	100	Persen	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100	Persen	2,880,175,367

Kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pertama adalah pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengamanahkan kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan satu aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara nasional, yang meliputi sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini direfleksikan pada sasaran pertama yang ingin dicapai oleh BPKAD Kabupaten Bogor yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* yang pada Tahun

2025 dituangkan dalam 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kedua adalah pengelolaan barang milik daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini direfleksikan pada sasaran kedua yang ingin dicapai oleh BPKAD Kabupaten Bogor yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib* yang pada Tahun 2026 dituangkan dalam Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isu strategis yang diangkat terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor adalah Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Hal ini terkait dengan isu strategis Provinsi yaitu “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang Berbasis Nilai-Nilai Keagamaan, Efisiensi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bermuara Kepada Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”. Isu ini terkait juga dengan isu Strategis Nasional yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”.

Tabel 3.8
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	BIDANG/SEKSI/SUBID/ UPT PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba	Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan	Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
	Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Daerah	Bidang Aset

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- **Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2) serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24). Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan”** dengan indikator tujuan yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Daerah** maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029.

3.2.1. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dicapai dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel** dengan **indikator tujuan** :

- **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

3.2.2. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. **sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi”**, dengan Indikator Sasaran :

- **Nilai SAKIP**

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**

Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. **Pertanggungjawaban** yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses **manajerial**, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat **pengawas** fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar, Hal ini tak lepas dari **berkualitasnya** Laporan keuangan yang di sajikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Target pencapaian sasaran *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi.*

Target indikator ini didukung melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*

Pengelolaan asset atau barang milik daerah sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah dan;
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan mendorong agar Perangkat Daerah dapat mematuhi kebijakan pengelolaan aset daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi tertib.

Target pencapaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

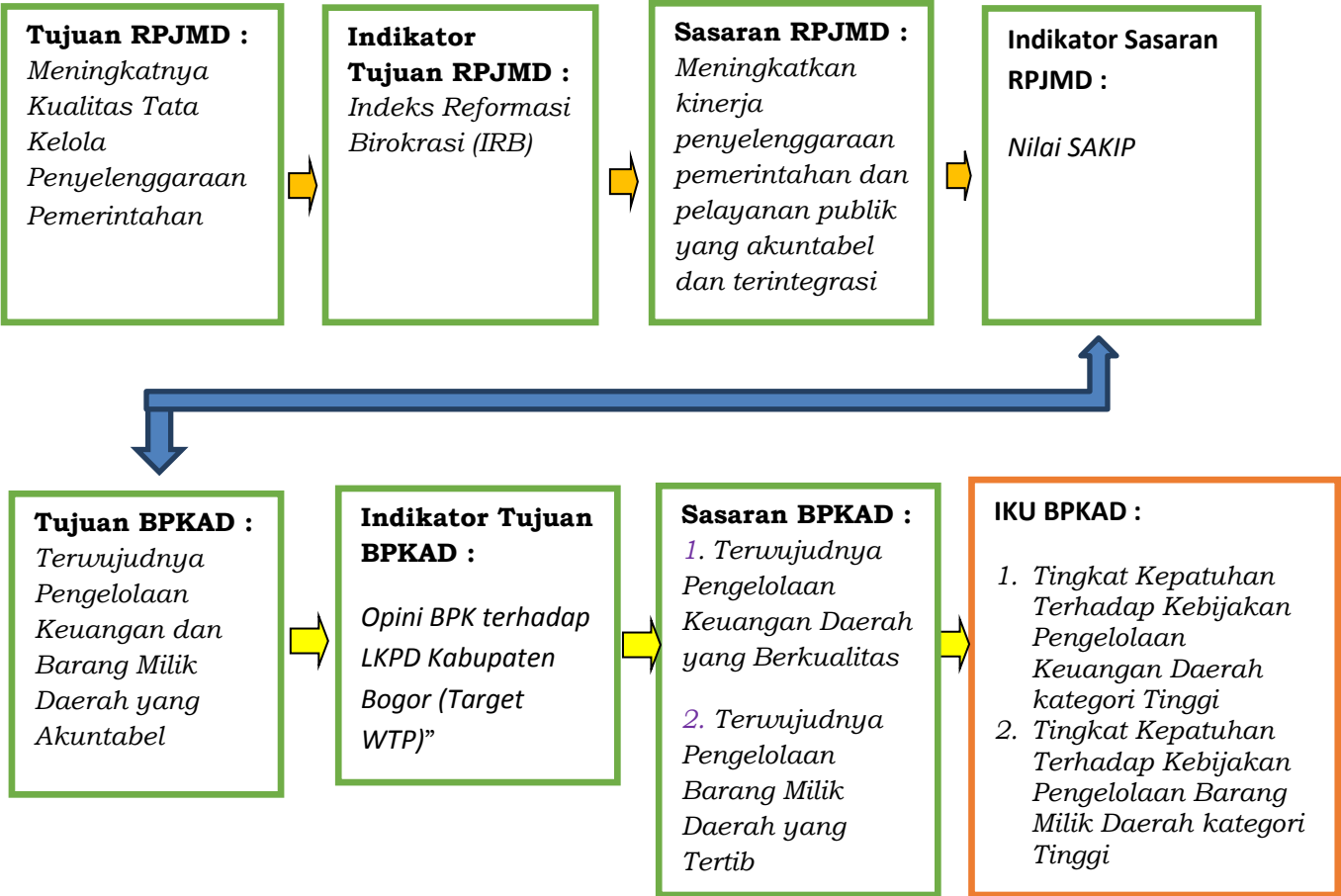
Target pencapaian **Sasaran** BPKAD Kabupaten Bogor dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel 3.9
Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2026
Berdasarkan Renstra 2025 – 2029 BPKAD

NO	URAIAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET TAHUN 2026	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
	SASARAN				
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	95.83	%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	91.67	%

Indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD berdasarkan atas rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bogor.

- Adapun Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD dapat disajikan pada bagan sebagai berikut :



Sumber : BPKAD, diolah,2025

Gambar 3.2
Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD

Sedangkan **Tujuan** dan **sasaran** yang akan dicapai pada Rencana Kerja BPKAD Tahun 2026 ditampilkan pada Tabel 3.7.



Tabel 3.10
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2026
BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029 BPKAD

Urusan/Unsur : Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Keuangan

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
						VOLUME
1	2	3	4	5	6	7
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN			
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Opini	WTP
SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)			
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi	Nilai SAKIP	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	95,83
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	91,67

Mengacu pada tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2025-2029.

Tujuan yang hendak dicapai BPKAD adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*. Adapun sasaran BPKAD pada Tahun 2026 ada 2 (dua) sasaran yaitu (1) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan (2) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.

Pencapaian Sasaran BPKAD ini diukur melalui Indikator Sasaran yaitu tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3.11
Sasaran dan Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029 BPKAD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi	95,83%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi	91,67%

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2026 yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi dengan Target 95,83%;
 2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi dengan Target 91,67%.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai oleh BPKAD diupayakan melalui beberapa program yaitu Program Pengelolaan

Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator program sebagai Tabel berikut:

Tabel 3.12
Indikator Program BPKAD Tahun 2026
Berdasarkan Renstra 2025-2029 BPKAD

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tepat Waktu
		Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	100%
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100%

- Untuk *Program Pengelolaan Keuangan Daerah* terdiri dari beberapa kegiatan yang indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKAD Tahun 2026

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2026
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100%
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100%
3.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	100%
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100%

5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	100%
----	---	--	------

- Sedangkan untuk *Program Pengelolaan Barang Milik Daerah* indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Tahun 2026

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2026
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100%

Tabel 3.15
Indikator Kegiatan pada Program Penunjang BPKAD Tahun 2026

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2026
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP BPKAD	BB

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Renstra BPKAD 2025-2029, maka pada Tahun Anggaran 2026 Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan sesuai hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Subkegiatan.
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Subkegiatan.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Subkegiatan.

Tabel 3.16
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2026

NO	BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	1	2	3	4	5
1.	Bidang Anggaran	1	1	10	5,583,692,888
2.	Bidang Perbendaharaan		2	10	1,642,443,896,565
3.	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi		2	11	2,516,162,103
4.	Bidang Aset	1	1	13	2,880,175,367
5.	Sekretariat	1	8	43	48,961,472,529
JUMLAH TOTAL		3	14	87	1,702,385,399,457

Dari 3 Program diatas kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan Subkegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 3.17
Program, Kegiatan dan Subkegiatan BPKAD Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian Program - Kegiatan - Subkegiatan
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.0001	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.2.01.0002	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.02.02.2.01.0003	Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5.02.02.2.01.0004	Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD
5.02.02.2.01.0007	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.0008	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.0009	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.0010	Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.0011	Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.0012	Subkegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.0001	Subkegiatan Kooordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.0003	Subkegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.0004	Subkegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

5.02.02.2.02.0005	Subkegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.0006	Subkegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.02.02.2.02.0009	Subkegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.0011	Subkegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.0001	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.0003	Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.0004	Subkegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5.02.02.2.03.0005	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.0006	Subkegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.0007	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.02.02.2.03.0009	Subkegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.0011	Subkegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.0008	Subkegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.0009	Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak
5.02.02.2.04.0010	Subkegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0001	Subkegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0002	Subkegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0003	Subkegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0001	Subkegiatan Penyusunan Standar Harga
5.02.03.2.01.0002	Subkegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0003	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0004	Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0005	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0006	Subkegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0007	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0008	Subkegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.0009	Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0010	Subkegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0011	Subkegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0012	Subkegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0013	Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0001	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0002	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0003	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0006	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.0007	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0008	Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan
5.02.01.2.02.0001	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0003	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.0004	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.02.01.2.02.0005	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5.02.01.2.02.0007	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.02.0008	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.2.03.0001	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.01.2.03.0002	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.01.2.03.0006	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.05.0003	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.0004	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.0005	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.02.01.2.05.0009	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.01.2.05.0011	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.06.0001	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.0002	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.0004	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.01.2.06.0005	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.01.2.06.0006	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.02.01.2.06.0008	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
5.02.01.2.06.0009	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.06.0010	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.0002	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.07.0005	Subkegiatan Pengadaan Mebel
5.02.01.2.07.0006	Subkegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
5.02.01.2.07.0010	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.07.0011	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.0001	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.0002	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.0004	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.0001	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.01.2.09.0002	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.0005	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
5.02.01.2.09.0008	Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud



5.02.01.2.09.0009	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02.01.2.09.0010	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.09.0011	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam dokumen perencanaan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan akan menjadi lebih implementatif jika sudah dijabarkan dalam program kegiatan termasuk dengan pendanaannya. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 berdasarakan Renstra tahun 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 telah menjabarkan sasaran dan arah kebijakan kedalam program/kegiatan utama dan program/kegiatan penunjang. Dinamika dalam proses perencanaan selalu terjadi mengikuti adanya perubahan peraturan-peraturan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga dokumen perencanaan pun akan menyesuaikan seperti adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang tentang Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang telah disusun hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

- **Tujuan** yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*.

Indikator tujuan BPKAD adalah *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

- sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi”***, dengan **Indikator Sasaran** Nilai SAKIP.

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;*
2. *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.*

- ✓ Pencapaian sasaran pertama *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kategori Tinggi dengan target kinerja 95,83%.

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1
Indikator Program BPKAD Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Program	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.Terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang berkualitas	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tepat Waktu
		1.2.Terwujudnya Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	100%
		1.3.Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	100%

- Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan yang indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Tahun 2026

No	Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terwujudnya Perencanaan Penganggaran Memenuhi Standar	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100%
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan Keuangan Daerah Memenuhi Standar	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100%
3.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	100%
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pelaporan Keuangan (LKPD) Kabupaten Bogor sesuai ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100%
5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya data dan informasi Lingkup Keuangan Daerah yang berkualitas	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir Lingkup Keuangan Daerah	100%

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah kategori Tinggi dengan target kinerja 91,67%.

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 4.3
Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
BPKAD Tahun 2026

No	Program	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100%

- Sedangkan untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya didukung oleh satu kegiatan dengan indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kegiatan pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
BPKAD Tahun 2026

No	Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.1. Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100%
		1.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaan nya sesuai ketentuan	100%
		1.3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100%

Tabel 4.5
Indikator Program Penunjang BPKAD Tahun 2026

No	Program	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BPKAD	BB

- Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kegiatan pada Program Penunjang BPKAD Tahun 2026

No	Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja lingkup BPKAD yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Standar	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan lingkup BPKAD yang berkualitas	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Tertib Administrasi lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan untuk ASN terkait administrasi kepegawaian lingkup BPKAD	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi Lingkup BPKAD	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	100%
		Terfasilitasinya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propemperbup	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah Memadai lingkup BPKAD	Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	100%
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi lingkup BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%

Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor berdasarkan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor 2025-2029, maka Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan RKPD 2026 yang telah ditetapkan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan sesuai RKPD 2026 yang telah ditetapkan adalah tertera pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026

PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PENGAMPU
1	2	3	4	5
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	10	5.583.692.888	BIDANG ANGGARAN
	2	10	1.642.443.896.565	BIDANG PERBENDAHARAAN
	2	11	2.516.162.103	BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	13	2.880.175.367	BIDANG ASET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8	43	48.961.472.529	SEKRETARIAT
JUMLAH	14	87	1.702.385.399.452	

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 BPKAD Kabupaten Bogor dapat dijabarkan pada Tabel 4.1. berikut ini :



Tabel 4.8

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Keuangan
Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						1,702,385,399,452						2,048,145,978,888		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1,702,385,399,452							2,048,145,978,888	
	5.02	KEUANGAN						1,702,385,399,452							2,048,145,978,888	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKAD	BB Kategori	BB Kategori	BB Kategori	BB Kategori	48,961,472,529						A Kategori	50,511,414,338	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	859,951,390			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100%	881,457,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	220,365,711	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	4 Dokumen	225,876,369	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	51,249,041	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	52,530,412	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	51,249,263	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	52,530,633	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	158,869,134	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	6 Laporan	162,842,447	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	326,972,941	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	17 Laporan	335,147,770	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51,245,300	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	52,530,069	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	34,168,035,595			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	35,022,325,585	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	527 Orang/bulan	86 Orang/bulan	87 Orang/bulan	104 Orang/bulan	33,616,711,516	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapatn Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	108 Orang/bulan	34,456,882,607	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	193,238,661	Kab. Bogor, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	198,101,732	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41,129,220	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	42,278,548	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	41,543,583	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Laporan	42,621,932	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	256,802,463	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	24 Laporan	263,341,207	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	18,610,152	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	19,099,559	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	120,400,444			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	122,995,881	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16,633,381	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	16,575,764	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	88,119,050	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	90,331,849	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	5 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15,648,013	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	16,088,268	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	729,132,847			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	761,605,149	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,288,270	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	26,118,980	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,393,429	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	20,654,527	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,951,148	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	21,419,142	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	150 Orang	18 Orang	30 Orang	30 Orang	212,500,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	30 Orang	220,631,250	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	750 Orang	150 Orang	30 Orang	180 Orang	450,000,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	180 Orang	472,781,250	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	3,289,453,955			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	3,681,656,092	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propempe rbup	100 %	100 %	100 %	100 %						Aparatur	10 Dokumen		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	195,765,372	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Paket	200,580,893	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	4 Paket	6 Paket	6 Paket	267,194,427	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	6 Paket	632,633,387	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	6 Paket	8 Paket	8 Paket	197,345,346	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	8 Paket	202,270,436	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	404,067,750	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Paket	414,338,144	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	164,712,500	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	168,839,640	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	102,500,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	4 Laporan	105,062,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,857,874,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	12 Laporan	1,857,931,092	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	99,994,560	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	4,790,034,333			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	4,916,316,493	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	180 Unit	18 Unit	36 Unit	36 Unit	3,976,756,500	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	36 Unit	4,076,814,561	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit	40,500,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	7 Unit	42,053,180	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	76 Unit	0 Unit	0 Unit	19 Unit	349,473,207	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	19 Unit	358,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	201,380,751	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	5 Unit	208,274,960	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	221,923,875	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	5 Unit	230,423,792	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	3,026,076,590			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	3,102,717,675	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	346,771,410	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	12 Laporan	355,402,827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,352,099,100	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	12 Laporan	1,386,824,790	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,327,206,080	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	12 Laporan	1,360,490,058	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	1,978,387,375			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	2,022,339,763	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit	9 Unit	17 Unit	17 Unit	144,000,000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	17 Unit	148,232,681	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	735 Unit	68 Unit	147 Unit	147 Unit	594,750,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	147 Unit	609,625,156	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	170 Unit	0 Unit	150 Unit	5 Unit	12,240,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	5 Unit	12,607,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	145,354,125	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Aplikasi	147,087,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	462,622,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	5 Unit	474,222,708	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	329,641,250	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Unit	333,531,518	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	289,780,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	6 Unit	297,032,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1,650,543,751,556						Tepat Waktu	1,994,625,418,527	
			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan	100%	99%	100%	100%							100%		
			Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%							100%		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM P OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	5,583,692,888			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	6,108,102,778	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	676,145,820	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	700,192,963	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	678,716,214	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	702,011,227	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	368 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	74 Dokumen	160,151,129	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	74 Dokumen	162,581,505	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	368 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	74 Dokumen	193,760,128	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	74 Dokumen	187,200,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,374,737,270	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	1,374,867,796	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,253,506,965	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	1,481,596,756	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	350 Dokumen	45 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	503,801,474	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	70 Dokumen	450,171,072	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107,041,362	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	104,471,589	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	244,958,513	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	252,367,574	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	390,874,013	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	692,641,981	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	2,420,236,643			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	2,521,108,685	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	357,321,770	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	12 Dokumen	367,645,003	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	397,607,416	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	5 Dokumen	399,160,569	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	216,395,603	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	238,120,131	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	287,651,238	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	5 Dokumen	283,663,021	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	275,115,760	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	297,784,831	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	636,783,866	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	672,091,274	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1140 Orang	72 Orang	228 Orang	228 Orang	249,360,990	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	228 Orang	262,643,856	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100 %	100 %	100 %	100 %	1,382,188,639			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	1,417,429,367	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223,566,114	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	262,652,740	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	95 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	327,685,722	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	19 Laporan	336,010,890	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	91,890,570	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	94,555,880	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	217,161,720	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	189,111,842	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	102,313,812	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	104,873,388	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	81,666,079	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	12 Dokumen	83,709,599	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	184,172,573	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	188,924,207	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	850 Dokumen	72 Orang	130 Orang	180 Orang	153,732,049	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	180 Orang	157,590,821	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	1,640,023,659,922			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	1,983,416,452,974	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,257,065,232,006	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	1,635,335,643,407	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	103,149,011,250	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	105,727,736,531	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	279,809,416,666	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	242,353,073,036	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutahir Lingkup Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	1,133,973,464			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	1,162,324,723	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,326,045	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	63,034,809	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	529,287,613	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	574,683,304	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2048 Orang	72 Orang	240 Orang	452 Orang	507,359,806	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	452 Orang	524,606,610	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	91.00 %	90.00 %	90.00 %	100 %	2,880,175,367						100 %	3,009,146,023	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	2,880,175,367			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	100 %	3,009,146,023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya sesuai ketentuan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									
			Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %							100 %		
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	255,680,730	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	337,248,451	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133,278,510	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	106,044,228	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	276,905,688	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	284,472,742	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105,057,407	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Dokumen	107,687,459	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	189,510,418	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	250,048,156	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	183,153,278	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	105,056,613	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	510,420,534	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	523,211,025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	239,374,617	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	200,105,791	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	206,021,196	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	211,174,732	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	286,482,611	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Dokumen	293,647,201	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	128,500,707	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	1 Laporan	119,770,995	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	250,129,843	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	2 Laporan	313,085,207	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	380 Orang	72 Orang	76 Orang	76 Orang	115,659,828	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Pendapat Asli Daerah (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Mew ujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance. 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Administrasi	Aparatur	76 Orang	157,593,423	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	J U M L A H							1,702,385,399,452							2,048,145,978,888	

BAB V PENUTUP

Demikian Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029, maka Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.



BUPATI BOGOR,
RUDY SUSMANTO